

**IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP UMUM AJARAN SOSIAL GEREJA
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL - EKONOMI DAN RELIGIUS PARA
PEDAGANG PASAR WAMANGGU KABUPATEN MERAUKE DALAM
TERANG *ENSIKLIK LABOREM EXERCENS* PAUS YOHANES PAULUS**

II.

(Sebuah Tinjauan Pastoral)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akademik

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama



Oleh :

RUPIDIAS BELYANAN

NIM: 1102030

NIRM: 11.10.421.0144.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AGAMA KATOLIK

SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS

MERAUKE

2016

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP UMUM AJARAN SOSIAL
GEREJA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL - EKONOMI DAN RELIGIUS
PARA PEDAGANG PASAR WAMANGGU KABUPATEN MERAUKE
DALAM TERANG *ENSIKLIK LABOREM EXERCENS* PAUS YOHANES
PAULUS II.**

Oleh:

RUPIDIAS BELYANAN

NIM : 1102030

NIRM : 11.10.421.0144.



Telah disetujui oleh:

Pembimbing,

**P. Anselmus Amo, MSC.SS.M.Kesos
2016**

Tanggal, 16 April

**IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP UMUM AJARAN SOSIAL GEREJA
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL - EKONOMI DAN RELIGIUS PARA
PEDAGANG PASAR WAMANGGU KABUPATEN MERAUKE DALAM
TERANG ENSIKLIK LABOREM EXERCENS PAUS YOHANES PAULUS**

II.

Oleh:

RUPIDIAS BELYANAN

NIM : 1102030

NIRM : 11.10.421.0144.

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 April 2016 dan dinyatakan memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
Ketua : P. Anselmus Amo, MSC.SS, M.Kesos.
Anggota : 1. Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum.
2. Fr. Agustinus Sigit, Pr.Diplo C.E.S.S.Bac.Theol.
3. P. Anselmus Amo, MSC.SS, M.Kesos.

Merauke, 23 April 2016
Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Ketua,

Rm. Donatus Wea Pr, Lic.Iur.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bernardus Belyanan dan alm. Marselina Wee)
2. Almamaterku Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

MOTTO

“Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil”.

(Mat 11:25)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak memuat karya atau bagian karya tulis orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana selayaknya karya ilmiah.

Merauke, 16 April 2016

Penulis

Rupidias Belyanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat, pertolongan, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Implementasi Prinsip – Prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja Dalam Kehidupan Sosial - Ekonomi Dan Relegius Para Pedagang Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke Dalam Terang Ensiklik Laborem Exercens Paus Yohanes Paulus II”, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Agama Katolik pada Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pastor Donatus Wea, Pr.Lic.Iur selaku Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
2. Pastor Anselmus Amo, MSC selaku dosen pembimbing.
3. Segenap panitia penguji Bpk. Xaverius Wonmut, dan Fr. Agustinus Sigit, Pr serta para dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah memberikan penilaian serta masukan terhadap skripsi ini.
4. Kedua orang tua, Bernardus Belayanan dan alm. Marselina Belayanan, terima kasih atas dukungan doa dan kepercayaanya, serta saudara-saudariku yang memberikan dukungan baik moril maupun materil.
5. Kepala UPTD Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke Bpk, Robert Anggawen yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu

untuk diwawancarai serta memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dari informasinya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Para pedagang di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke terlebih khusus para pedagang yang meluangkan waktu mereka untuk diwawancarai, sehingga dari informasi mereka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pada civita akademika Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang dengan senang hati memberikan dukungan dan doa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pedagang untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka, dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik khususnya mengenai Ajaran Sosial Gereja yang menjadi bukti partisipasi Gereja dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dan dunia.

Merauke, 16 April 2016

Rupidias Belyanan

ABSTRAK

Nama : Rupidias Belyanan
Program Studi : Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik
Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja Dalam Kehidupan Sosial - Ekonomi Dan Relegius Para Pedagang Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke Dalam Terang *Ensiklik Laborem Exercens* Paus Yohanes Paulus II.

Pihak pengelola dan pedagang pasar Wamanggu Kabupaten Merauke, memandang perlu diterapkan 3 prinsip umum ajaran sosial Gereja, yakni Solidaritas, Subsidiaritas dan Kesejahteraan Umum bagi kehidupan sosial-ekonomi dan relegius para pedagang. Di samping itu para pedagang mengharapkan bantuan pemerintah dan pihak terkait dalam masalah modal usaha dan sosialisasi atau pelatihan guna meningkatkan kualitas barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan mengamati dan mendeskripsikan sejauh mana penerapan tiga prinsip umum ajaran sosial Gereja tersebut serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan mewawancarai 18 informan. Hasil dari penelitian adalah telah diterapkan 3 prinsip ini, namun belum secara keseluruhan dan masih bersifat kekeluargaan dan kedekatan sesama pedagang.

ABSTRACT

Name : Rupidias Belyanan
Study Program : Education and Teaching of the Catholic Religion
Title : Implementation of General Principles of the Social
Doctrine of the Church In Social Life - Economic and
Market Traders of Wamanggu relegius Merauke In the
Light of the Encyclical *Laborem exercens* by Pope John
Paul II.

The management and market traders of Wamanggu Merauke, deems it necessary to apply 3 general principles of the social doctrine of the Church, namely Solidarity, Subsidiarity and Public Welfare for the socio-economic and relegius traders. Besides, traders expect government assistance and related parties in the matter of venture capital and socialization or training to improve the quality of goods and services to improve the quality of goods and services. The aim of this study was to observe and describe the extent of the application of the three general principles of the Church's social doctrine as well as enabling and inhibiting factors. The research method is qualitative interviews with 18 informants. The results of the research are applied 3 to this principle, but not yet as a whole and is still the kinship and closeness fellow traders.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Manfaat Penulisan	8
G. Metodologi Penelitian	11
H. Panduan Instrumen Pengumpulan Data	24
I. Sistematika Penulisan	26

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Prinsip-prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja	
1. Solidaritas	
a. Pengertian Solidaritas	27
b. Makna dan Nilai Solidaritas.....	28
c. Solidaritas Sebagai Sebuah Prinsip Sosial dan Kebajikan Moral	29
d. Solidaritas dan Pertumbuhan Bersama Umat Manusia	31
e. Solidaritas di dalam Kehidupan dan Pesan Yesus Kristus.....	33
2. Prinsip Subsidiaritas	
a. Pengertian Subdiaritas	35
b. Asal Usul dan Makna.....	35
c. Petunjuk-petunjuk Konkret.....	37
3. Kesejahteraan Umum	
a. Pengertian Kesejahteraan Umum.....	39
b. Makna dan Implikasi-Implikasinya yang Utama.....	40
c. Tanggung Jawab Setiap Orang Bagi Kesejahteraan Umum	41
d. Tugas-Tugas Masyarakat Politik	42
B. Ensiklik Laborem Exercens	
1. Terbentuknya Dokumen LE.....	43
2. Struktur dan Argumentasi LE	50
C. Jenis-jenis Pasar dan Pandangan Gereja tentang Pasar	
1. Pasar Tradisional.....	54
2. Pasar Modern	54
3. Pandangan Gereja Tentang Pasar.....	55
D. Pengertian Modal serta Pandangan Gereja tentang Modal dan Kerja	
1. Pengertian Modal	56
2. Jenis-jenis Modal	56
3. Pandangan Gereja Tentang Modal dan Kerja	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN DESKRIPSI DATA

A. Letak Geografis Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke	59
---	----

1. Lokasi Penelitian.....	59
2. Latar Belakang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Wamanggu	60
3. Jumlah Pedagang, Pegawai, dan Sarana yang Ada.....	60
B. Latar Belakang Kehidupan Responden	62
1. Keadaan Ekonomi Responden	62
2. Keadaan Sosial Budaya.....	64
3. Keadaan Sosial Relegius	65
C. Regulasi dan Aktivitas Pasar Wamanggu	66
1. Regulasi Pasar Wamanggu	66
2. Aktivitas di Pasar Wamanggu.....	67

BAB IV PEMBAHASAN DAN INTERPRETASI DATA

A. Penerapan Prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja	69
1. Uraian Teori	69
a. Prinsip Solidaritas	69
b. Prinsip Subsidiaritas.....	70
c. Prinsip Kesejahteraan Umum	71
2. Pembahasan Hasil Wawancara	72
a. Prinsip Solidaritas	72
b. Prinsip Subsidiaritas.....	77
c. Prinsip Kesejahteraan Umum	79
B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke	
1. Faktor-faktor Pendukung	82
a. Prinsip Solidaritas	82
b. Prinsip Subsidiaritas.....	84
c. Prinsip Kesejahteraan Umum	86
2. Faktor-faktor Penghambat.....	87
a. Prinsip Solidaritas	87
b. Prinsip Subsidiaritas.....	88
c. Prinsip Kesejahteraan Umum	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	95
1. Bagi Pedagang Pasar Wamanggu	95
2. Bagi Pemerintah	95
C. Implikasi Pastoral	96
DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI	98

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

A. Singkatan Dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja

ASG	: <i>Ajaran Sosial Gereja</i>
CA	: <i>Centesimus Annus</i>
CU	: <i>Convenientes Ex Universo</i>
EN	: <i>Evangelii Nuntiandi</i>
GS	: <i>Gaudium Et Spes</i>
LE	: <i>Laborem Exercens</i>
MM	: <i>Mater et Magistra</i>
OA	: <i>Octogesima Adveniens</i>
PP	: <i>Populorum Progressio</i>
PT	: <i>Pacem In Terris</i>
QA	: <i>Quadragesimo Anno</i>
RH	: <i>Redemptor Hominis</i>
RN	: <i>Rerum Novarum</i>
SRS	: <i>Solllicitudo Rei Socialis</i>
Ens	: Ensiklik
bdk	: bandingkan

B. Singkatan lain-lain

UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang
UPTDPP	: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar
KIP	: Kartu Identitas Pedagang
KBP	: Kartu Bukti Pedagang
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
ibid	: ibidem
BRI	: Bank Rakyat Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel Alokasi Waktu Penelitian.....	13
Tabel Data yang Dibutuhkan dan Informan.....	18
Tabel Proses Pengumpulan Data.....	24
TabelKlasifikasi Pedagang di Pasar Wamanggu	52
Tabel Latar Belakang Suku.....	53
Tabel Jumlah Pedagang Berdasarkan Keyakinan/Agama	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar Proses Pengumpulan dan Analisis Data..... 21

Lampiran-lampiran

Gambar Aktivitas di Pasar Wamanggu Pkl, 02.00 WIT

Gambar Suasana Pasar yang sepi di Sore Hari

Gambar Jumlah Barang Jualan yang Banyak di Pelataran Pasar

Gambar Suasana Pasar Khususnya Ruko-Ruko yang tutup karena Sepi

Gambar Jenis Pedagang Musiman

Gambar Aktivitas Petugas Kebersihan Pasar

Gambar Pedagang yang Berjualan di depan Pintu Masuk Pasar

Gambar Suasana di dalam Pasar yang sepih Banyak Jualan Sisa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stabilitas perekonomian sangat tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara. Sistem perekonomian yang dianut oleh Negara Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan berarti menjadikan asas-asas dan prinsip seperti kerakyatan, kekeluargaan, kesejahteraan umum dan keadilan sebagai asas yang dianut dalam menjalankan perekonomian. Berbicara mengenai sistem perekonomian suatu negara pasti tidak bisa terlepas dari mekanisme pasar yang sangat berpengaruh. Mekanisme pasar merupakan suatu *trend* perkembangan permintaan dan penawaran harga barang dan jasa di pasar yang akan menentukan harga jual suatu produk.

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa¹. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan interaksi antar penjual dan pembeli dalam menawarkan barang dan jasa. Jenis-jenis pasar dapat dibedakan menurut kategori, fisiknya, waktu, barang yang diperjualbelikan, menurut luas kegiatannya, menurut bentuknya dan menurut sifat pembentukan harganya. Tujuan utama dari sebuah usaha adalah memberikan keuntungan (laba) bagi pengusaha/pedagang itu sendiri, sehingga dia bisa membantu pedagang yang lain untuk bekerjasama. Dalam konsep ini tidak terlepas dari Ajaran Sosial Gereja, yang mengutamakan solidaritas, subsidiaritas

¹Muhamad Fua, Pengantar Bisnis. (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2003),hlm.28-31

dan kesejahteraan umum sebagai sebuah acuan dalam menjalankan usaha atau berdagang.

Ada beberapa jenis pasar menurut fisiknya yaitu, pasar konkret (nyata) dimana penjual dan pembeli saling bertemu dan melakukan transaksi secara langsung, sedangkan pasar abstrak (pasar tidak nyata) adalah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet, dan lain-lain berdasarkan contoh barang. Pasar menurut sifatnya dibagi menjadi dua bagian, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional yang ditandai dengan pembeli serta penjual bertemu secara langsung. Pasar tradisional berlangsung proses tawar-menawar antara penjual dengan pembeli dan harga barang bukan merupakan harga tetap, dengan kata lain bisa ditawar dan tidak tetap, berbeda dengan pasar modern.

Pasar tradisional juga tidak memandang situasi dan lokasi. Proses jual beli atau dagang membutuhkan modal dan perencanaan yang memadai guna membantu kelancaran berdagang. Modal tidak hanya dilihat dari segi materi semata, akan tetapi modal juga diukur dari segi kualitas sumber daya manusianya. SDM sangat berpengaruh bagi seorang pedagang dalam mengatur waktu bersama keluarga, serta kebersamaan di dalam sebuah organisasi.²

“Sebagai pribadi manusia adalah subyek kerja dan memiliki martabat sejauh merupakan aktivitas manusia. Melalui pekerjaan manusia tidak hanya mengubah kodratnya, tetapi juga mewujudkan dirinya membangun masyarakat keluarga dan bangsa”³.

Berbicara tentang modal dan kerja merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam menjalankan usaha. Modal

² Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: YKPN 1997), hlm 19-20

³ Paus Yohanes Paulus II, "Hubungan antar kerja dan modal" (LE)

membutuhkan kualitas manusia dalam mengaturnya, begitu juga dengan kerja. Bahwa modal dan kerja tidak dapat dipisahkan, keduanya mengandung unsur saling melengkapi dalam visi *teologis* maupun *humanistis*⁴. Modal menjadi kekuatan utama seseorang untuk menjamin keberlangsungan usahanya. Modal dalam arti pasar atau ekonomi, yakni ”dasar atau kaki” untuk menjalankan usaha, dalam hal ini modal memiliki banyak arti berhubungan dalam ekonomi, *finansial* dan *accounting*. Ada beberapa jenis modal di antaranya, modal asing dan modal sendiri. Modal asing berasal dari luar (eksternal) bisa saja berupa bantuan dari pihak terkait maupun koperasi atau simpan pinjam. Sedangkan modal sendiri berasal dari orang terkait yang melakukan usaha, bisa berupa uang maupun barang yang hendak didagangkan⁵.

Pedagang merupakan sebuah profesi yang harus disadari, oleh karena itu seseorang harus mengerti dan memahami tujuan dari berdagang. Dengan modal yang dimilikinya menjadikan seseorang lebih produktif dalam menjalankan usahanya. Modal yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang dimilikinya yang menjamin usahanya, sehingga dapat memberikan jaminan akan kualitas dan kelanjutan barang dagangannya. Pedagang harus pintar dan jeli dalam mengatur waktu; waktu bersama keluarga, waktu bersama kelompok dan waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pelindungnya⁶. Keefektifan dalam mengatur waktu menjadi hal wajib dan mendasar dalam dunia kerja. Kerja merupakan suatu hal yang mendasar, sebab kerja atau usaha juga merupakan

⁴Paus Yohanes II” Evolusi Masyarakat” (LE)

⁵Bambang.R. “Modal dan Usaha” (Gramedia : Jakarta,1993)

⁶ James Spillane, *Time management* (Yogyakarta: Kanisius 2003), hlm.31-32

sebuah persyaratan bagi pembentukan keluarga, namun apa artinya pekerjaan bila keluarga dan kewajiban terkait diabaikan⁷.

“Beristirahat merupakan sebuah hak dari pekerja. Sama seperti Allah berhenti bekerja pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya”(Kej 2:2), demikianlah pula manusia, yang diciptakan juga menurut kehendak-Nya, mesti memiliki istirahat yang cukup guna mengurus keluarga, budaya dan agamanya⁸”

Dari observasi penulis, tentang sebagian pedagang Pasar Wamanggu kota Merauke yang kurang memiliki pemahaman akan dunia usaha. Hal ini nampak terlihat, dari segi pendapatan para pedagang tradisional (pribumi) yang banyak mengeluh akibat dagangannya yang kurang diminati pengunjung serta minimnya tempat berjualan/kios. Pasar ini telah berdiri (diresmikan) 2 (dua) tahun yang lalu, namun para pedagang pasar Wamanggu Merauke yang notabene adalah masyarakat lokal, tidak mencerminkan adanya kemakmuran atau kesejahteraan baik dari segi fisik yakni tempat tinggal (rumah), maupun sarana dan prasarana yang menunjang hidup mereka dan juga interaksi sosial antara pedagang yang masih bersifat tertutup. Pertanyaannya adalah, sejauh mana para pedagang menerapkan sikap solidaritas antar para pedagang? Apakah para pedagang saling berbagi pengalaman dalam usaha atau dagang? Atau dari segi modal dan bantuan pihak terkait? Hal ini tidaklah mudah untuk dijawab, namun harus disadari akan nilai kehidupan yang melekat pada setiap pribadi.

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam memilih judul ini adalah menggambarkan atau mendeskripsikan sejauh mana para pedagang memahami dan menjalankan makna prinsip umum ajaran sosial Gereja, yakni pertama solidaritas,

⁷Paus Yohanes Paulus II, “ Keluarga kehidupan Ekonomi dan Kerja.

⁸Kompendium Ajaran Sosial Gereja, hlm.157.

yaitu para pedagang saling membantu pedagang yang lain serta ikut bekerjasama dalam menjalankan usaha, memiliki hati untuk berbagi dan ikut merasakan kesulitan apa yang dialami oleh rekannya, yang kedua adalah subsidiaritas yakni, terciptanya keterlibatan antar para pedagang serta adanya kesempatan bagi para pedagang pemula dalam menawarkan barang dan jasa tanpa diskriminasi dari pihak manapun, dan yang ketiga adalah kesejahteraan umum yakni, pencapaian dari tujuan berdagang yang nampak dalam segi materi atau harta benda yang menjadi pencapaian atas hasil dagang yang telah berlangsung guna menciptakan keharmonisan baik bagi para pedagang maupun para pembeli sebagai sebuah kesuksesan dari pencapaian target berdagang. Melihat realita ini penulis tertarik untuk memilih judul penulisan yaitu: Implementasi Prinsip-Prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Religius Para Pedagang Pasar Wamunggu Kota Merauke Dalam Terang *Ensiklik Laborem Exercens* Paus Yohanes Paulus II.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sikap solidaritas yakni ikut merasakan penderitaan sesama pedagang
2. Kurangnya sikap subsidiaritas yakni keterlibatan dalam diri para pedagang dalam hal membantu dan memberikan kesempatan kepada para pedagang pemula di antara para pedagang
3. Tidak terlihat sikap kebersamaan dalam diri para pedagang guna kesejahteraan bersama
4. Dampak sebagian pedagang yang hanya mementingkan dirinya sendiri menimbulkan kurangnya relasi yang baik antara para pedagang

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis temukan, penulis memilih masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian, oleh karena itu penulis memberikan pembatasan masalah yang sesuai dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Pentingnya sikap solidaritas, subsidiaritas dan kesejahteraan umum dalam diri para pedagang.
2. Makna prinsi-prinsip umum Ajaran Sosial Gereja terhadap keberlangsungan usaha para pedagang agar terwujud tujuan bersama.

Hal mendasar ini dapat membantu penulis dalam mencari pokok-pokok permasalahan yang hendak penulis peroleh, serta dapat merangkum dan memberi solusi dari masalah yang hendak penulis teliti lebih lanjut.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana aktivitas dan mekanisme pasar Wamanggu Kabupaten Merauke dalam mencerminkan dan menerapkan prinsip-prinsip umum Ajaran Sosial Gereja (solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum) bagi kehidupan sosial, ekonomi dan relegius para pedagang dalam terang *ensiklik Laborem Exercens*?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi prinsip-prinsip umum ajaran sosial Gereja (solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum), dalam dunia usaha, para pedagang di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa aktivitas dan mekanisme pasar Wamanggu Kabupaten Merauke dalam mencerminkan dan menerapkan prinsip-prinsip umum Ajaran Sosial Gereja (solidaritas, subsidiaritas, dan

kesejahteraan umum), bagi kehidupan sosial, ekonomi dan religius para pedagang dalam terang *ensiklik Laborem Exercens*.

2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip umum Ajaran Sosial Gereja dalam kehidupan sosial, ekonomi dan religius para pedagang pasar Wamunggu kota Merauke serta dapat menjadi acuan guna menjalankan usaha dagang dalam terang *ensiklik Laborem Exercens*.

F. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan membawa manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Bagi Penulis

Penulis semakin memahami dan menghayati prinsip-prinsip umum Ajaran Sosial Gereja khususnya bagi kehidupan sosial, ekonomi dan religius para pedagang pasar Wamunggu Kabupaten Merauke, dan juga sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik.

2. Bagi Para Pedagang Pasar Wamunggu Kabupaten Merauke

Semoga penelitian ini membawa manfaat bagi para pedagang, dalam menerapkan sikap solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum dalam upaya peningkatan kesejahteraan bersama ke arah yang lebih baik.

3. Bagi Lembaga Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan studi di Perguruan Tinggi, khususnya di Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik - Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke terkait Ajaran Sosial Gereja dalam menyikapi permasalahan sosial yang terjadi.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke sebagai pengelola pasar Wamanggu, dalam hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan sarana fisik (pasar), serta peraturan terkait pengelolah pasar bagi para pedagang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pedagang dalam menawarkan barang dan jasa.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Neuman (2006:151) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif sering mengandalkan interpretasi dalam ilmu sosial. Para peneliti ini menerapkan “logic in practice” – suatu logika dalam penelitian yang berdasarkan pada model belajar dan sharing pengetahuan secara implisit tentang hal-hal praktis dan pengalaman-pengalaman yang spesifik – dan mengikuti suatu jalan penelitian yang bersifat non linear. Dalam pendekatan

ini, mereka berbicara tentang “kasus dan konteks”. Tekanan dalam penelitian ini adalah penjelasan mendetail atas kasus-kasus yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat⁹.

Pendekatan ini dipakai untuk meneliti kedalaman dari penerapan prinsip-prinsip umum Ajaran Sosial Gereja bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius para pedagang pasar Wamanggu Kabupaten Merauke. Melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh data-data yang komprehensif melalui kontak langsung dengan fenomena sosial dalam diri pedagang, memahami sikap dan tingkah laku pedagang dan mengikuti proses sosial yang ada (Rubin & Babbie, 2008:417). Data-data tersebut kiranya menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan lebih bersifat deskriptif. Silalahi (2009:27-28) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang suatu situasi tertentu dengan latar belakang sosialnya dan hubungan-hubungan yang terkait di dalamnya. Penelitian deskriptif mengacu pada sifat-sifat atau karakteristik suatu masyarakat, benda, atau peristiwa yang diteliti. Hasil penelitian dengan jenis deskriptif ini diharapkan lebih dalam, lebih luas, dan terperinci.¹⁰

⁹ Anselmus Amo, “*Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pertanian Sayur Mayur Oleh PT Selaras Inti Semesta Kampung Zanegi*” (Tesis). (Depok, 2013), hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.10

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Pengumpulan Data

a. Lokasi/Tempat

Berdasarkan judul yang dipilih penulis, maka lokasi Penelitian dilakukan di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke, Papua. Alasan pemilihan Pasar Wamanggu sebagai lokasi penelitian adalah karena Pasar Wamanggu berada di pusat Kota Merauke dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta memiliki izin dalam hal mekanisme pasar. Sementara itu, pedagang Pasar Wamanggu sendiri menggantungkan hidupnya pada pasar, hal menarik yang ditemukan dalam observasi adalah sebagian pedagang lokal (pribumi) tidak memiliki tempat, sehingga mereka melakukan atau menyajikan barang dagangan di luar areal pasar sementara pedagang non lokal menggunakan tempat yang telah disediakan. Ada juga pedagang yang tidak menggunakan kehadiran pasar (fisik) dengan baik dan berjualan di pinggir jalan bahkan di atas kuburan umum. Sangat diperlukan sikap solidaritas, subsidiaritas demi kesejahteraan umum/bersama para pedagang.

b. Waktu

Penelitian ini dimulai dengan rancangan penelitian dan studi kepustakaan, mengumpulkan data-data lapangan, menganalisis dan membuat laporannya. Penelitian lapangan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2016-Maret 2016. Tabel di bawah ini menggambarkan alokasi waktu penelitian tersebut.

Table 1.1 Alokasi Waktu Penelitian

Materi/Kegiatan	Waktu
Rancangan Penelitian	Juni-November 2015
Studi kepustakaan dan dokumen	Juli-September 2015
Ujian Proposal Penelitian	November 2015
Penelitian lapangan	Desember 2015-Maret 2016
Analisa Data	Maret 2016
Ujian Hasil Penelitian	April 2016
Publikasi	Mei 2016

4. Populasi, Sampel dan Informan

a. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah para pedagang di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke yang berjumlah 1.100 (seribu seratus) pedagang dari jenis atau aneka dagang yang berbeda dan menempati lokasi atau areal pasar.

b. Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian para pedagang berjumlah 17 pedagang. Selain itu, teknik sampling dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan).

c. Informan

Informan sering disebut juga sebagai responden. Rubin & Babbie (2008:343-344) menyebutkan bahwa responden dalam penelitian kualitatif adalah orang yang menyediakan informasi tentang diri mereka sendiri dan karena itu memberikan kepada peneliti suatu gambaran dari

kelompok yang diwakili oleh responden tersebut. Informan adalah anggota dari kelompok atau orang lain yang mengetahui dan memberikan informasi yang berharga tentang kelompok tersebut apa adanya.

Teknik yang digunakan dalam penelitian informan ini adalah teknik *purposive sampling* (*sampling* bertujuan). Menurut Neuman (2013:298), *sampling bertujuan* adalah “jenis sampel yang bermanfaat untuk situasi khusus.” Peneliti berusaha untuk mencari informasi dari informan yang sudah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian¹¹. Berdasarkan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian di atas, maka informan dan responden dalam penelitian ini berjumlah 18 orang, yakni 17 pedagang dan 1 kepala pasar. Untuk lebih jelasnya, para informan dapat dikelompokkan seperti berikut ini:

- 1) Para Pedagang Asli Papua (mama-mama Papua) yang berada dalam areal pasar: Para Pedagang Lokal Pasar Wamanggu yang berada dalam areal pasar adalah mama-mama Papua yang mau mencari nafkah dan merubah kehidupan dengan menggunakan sarana yang ada. Dengan kekurangan yang mereka miliki mereka mau mengambil bagian dalam usaha berdagang dengan menggunakan jasa pemerintah terkait tempat yang ditempati. Mama-mama Papua ini menjual barang dagangan yang masih bersifat tradisional (makanan lokal) dan hampir kemiripan atau

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11

sama barang dagangannya. Mama Papua yang hendak diambil dalam informan ini berjumlah 9 orang. Dari jenis keragaman barang dagangannya, misalnya sayur-mayur, ubi-ubian, sagu, pisang, dll. Dari para pedagang lokal akan diperoleh informasi tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip-prinsip ASG (solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum) bagi para pedagang pasar Wamanggu Merauke.

- 2) Para Pedagang non Papua: Pedagang non Papua adalah para pedagang yang berasal dari luar daerah papua misalnya, Jawa, Makasar, Sumatera, dll. Para pedagang ini juga memiliki jenis barang dagangan yang beragam, oleh karena itu peneliti akan mengambil 8 informan secara acak, yakni 1 pedagang sayur-mayur, 1 pedagang ikan, 1 pedagang daging, 1 pedagang sembako, 1 pedagang pakaian, 1 pedagang perhiasan, 1 pedagang ART (alat rumah tangga), 1 pedagang alat elektronik, 1 pedagang sepatu-sandal. Dari para pedagang non Papua akan diperoleh informasi tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip-prinsip ASG (solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum).
- 3) Kepala UPTD Pengelola Pasar Wamanggu Merauke adalah pembuat kebijakan berdasarkan peraturan Bupati No. 8 tahun 2013 tentang Pengelola pasar. mereka yang mengelolah pasar

yang bekerja atas nama Pemerintah Daerah guna pendapatan daerah berdasarkan pajak yang dipungut dari setiap pedagang yang menggunakan jasa Pemerintah dalam hal ini tempat yang telah disiapkan guna kemajuan dan kenyamanan pasar. Dari pengelola pasar ini diperoleh informasi tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip-prinsip umum ASG (solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum) bagi para pedagang pasar Wamanggu Merauke.

Table 1.2 Data yang dibutuhkan dan Informan

No	Data yang dibutuhkan	Informan
1.	<p>Proses penerapan prinsip-prinsip umum ASG bagi pedagang di dalam areal Pasar Wamanggu</p> <p>Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapan prinsip-prinsip umum ASG bagi para pedagang pasar Wamanggu Merauke</p> <p>Faktor-faktor pendukung dan penghambat</p>	<p>8 pedagang asli Papua dengan aneka dagangan /jualannya.</p> <p>9 pedagang non Papua dengan aneka dagangan/jualannya.</p>
2.	<p>Proses penempatan tempat/kios setelah dibangun pasar dan partisipasi pedagang terkait iuran para pedagang perhari, guna pengelolaan pasar Wamanggu. Serta luas areal pasar, jumlah pedagang, asal pedagang, jumlah kios, aneka barang dagangan. Terkait juga tentang keamanan dan kenyamanan pedagang dan pengunjung.</p>	<p>Kepala UPTD</p> <p>Pengelola Pasar Wamanggu (1 orang)</p>

	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapan ASG pada pasar Wamanggu: Faktor pendukung dan penghambat.</p>	
--	---	--

5. Definisi Operasional

Prinsip-prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja

a. Solidaritas

- 1) Rasa kebersamaan dalam kelompok
- 2) Kesetiakawanan dalam mencapai tujuan bersama
- 3) Ketetapan hati untuk tujuan bersama
- 4) Prinsip sosial dan kebajikan moral
- 5) Pengorbanan pribadi demi tujuan bersama
- 6) Partisipasi dalam tujuan bersama

b. Subsidiaritas

- 1) Pemberian bantuan
- 2) Memberikan kepercayaan penuh kepada sesama
- 3) Saling menghargai dan memotivasi
- 4) Keterlibatan serta tanggung jawab
- 5) Pemberian kesempatan
- 6) Menghormati orang lain dalam kebersamaan

c. Kesejahteraan Umum

- 1) Kesamaan hak dan martabat
- 2) Keamanan dan kenyamanan bersama

- 3) Kemakmuran dan ketentraman semua orang
- 4) Tanggung jawab dalam kelompok
- 5) Kesempurnaan dalam mencapai tujuan bersama
- 6) Harta benda dan sarana prasarana umum

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Neuman (2006:379) menyebutkan bahwa dalam pengumpulan data, peneliti secara langsung berbicara dengan dan mengamati orang-orang yang menjadi sumber data. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari studi literatur.

a. Studi/Tinjauan Literatur dan Dokumen

Bordens & Abbott (2011:66-77) menegaskan bahwa dalam mempersiapkan penelitian lapangan, peneliti perlu mempelajari literatur ilmiah (*reviewing the literature*) sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan ide penelitian lapangan. Studi/tinjauan literatur (*literature review*) adalah “*the process of locating, obtaining, reading and evaluating the research literature in your area of interest*” (proses menemukan, memperoleh, membaca, dan mengevaluasi literatur penelitian di bidang yang anda minati)¹². Tinjauan literatur ini penting untuk menghindari usaha memperbanyak bahan bacaan yang tidak berguna; mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang menarik untuk dijawab sesuai dengan bidang penelitian; memperoleh masukan untuk membuat rancangan

¹² Anselmus Amo, “*Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pertanian Sayur Mayur Oleh PT Selaras Inti Semesta Kampung Zanegi*” (Tesis). (Depok, 2013), hlm. 15

penelitian; dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang yang diteliti. Literatur ini dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal ilmiah, konvensi dan pertemuan professional, dan sumber-sumber informasi penelitian lainnya (misalnya dari internet).

Hal senada juga diungkapkan oleh Neuman (2013:468-489) yang mengatakan bahwa sebelum memasuki lapangan, peneliti perlu mempersiapkan diri, antara lain dengan membaca literatur ilmiah, seperti laporan penelitian lapangan, buku harian, novel, film, catatan jurnalistik, dan autobiografi. Hal ini dimaksudkan agar peneliti terbantu dalam mempelajari konsep, perangkat tersembunyi, metode pengumpulan data, dan teknik untuk menyelesaikan konflik.

Neuman (2013:402) juga menyebutkan bahwa peneliti kualitatif dapat menggunakan dokumen atau laporan statistik untuk memeriksa konteks yang lebih besar dari penciptaan, distribusi, dan penerimaannya. Dokumen atau laporan statistik tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai makna suatu peristiwa atau interaksi sosial.

Peneliti telah mendahului proses ini dengan studi dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip umum ASG bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius para pedagang pasar Wamanggu Kabupaten Merauke. Dokumen ini menjadi landasan untuk latar belakang penelitian ini. Studi dokumen juga akan tetap dilanjutkan ketika terjun ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai penerapan prinsip-prinsip umum ASG bagi para pedagang pasar Wamanggu. Dokumen program ini dapat

menjadi rangsangan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang digali dalam wawancara mendalam dan observasi

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data secara komprehensif, maka dapat dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Taylor and Bogdan (dalam Minichiello, dkk., 1995:68) mendefinisikan *indepth interviews* sebagai “perjumpaan tatap muka berulang-ulang antara peneliti dan informan secara langsung terhadap pemahaman informan akan kehidupan mereka, pengalaman-pengalaman atau situasi-situasi mereka sebagaimana diekspresikan melalui kata-kata mereka sendiri”. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara mendalam ini digunakan untuk mendukung tujuan penelitian.

c. Observasi

Selain wawancara mendalam, peneliti juga mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, yakni pengamatan langsung di lapangan. Raymond Gold (dalam Rubin and Babbie, 2008:438-439) menjelaskan bahwa dalam observasi ada empat peran yang berbeda dari seorang observer, yakni “complete participant” (partisipasi penuh), “participant-as-observer” (partisipasi yang bertindak sebagai pengamat), “observer-as-participant” (pengamat yang turut berpartisipasi), dan “complete observer” (pengamat penuh). Untuk penelitian ini peneliti dapat mengambil bagian pada peran pengamat penuh dan juga berpartisipasi.

Neuman (2013:484-493) memberikan beberapa cara untuk memperoleh data lapangan kualitatif yang baik, yakni serap dan alami, lihat dan dengar, dan

merekam data. Dalam menyerap dan mengalami situasi di lapangan, peran peneliti menjadi penting, yakni sarana untuk mengukur data lapangan. Peneliti memperhatikan, melihat, dan mendengar dengan cermat. Semua indera digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang suatu subyek yang diteliti. Data-data yang ditemukan di lapangan kemudian direkam dalam bentuk catatan penelitian. Catatan penelitian ini dapat berupa “jotted notes”, catatan observasi langsung, catatan inferensi, memo analitis, catatan pribadi, catatan wawancara, peta/diagram/artefak, dan data yang direkam oleh mesin. Cara-cara ini dapat digunakan dalam melakukan penelitian penerapan prinsip-prinsip umum ASG bagi para pedagang pasar Wamanggu.

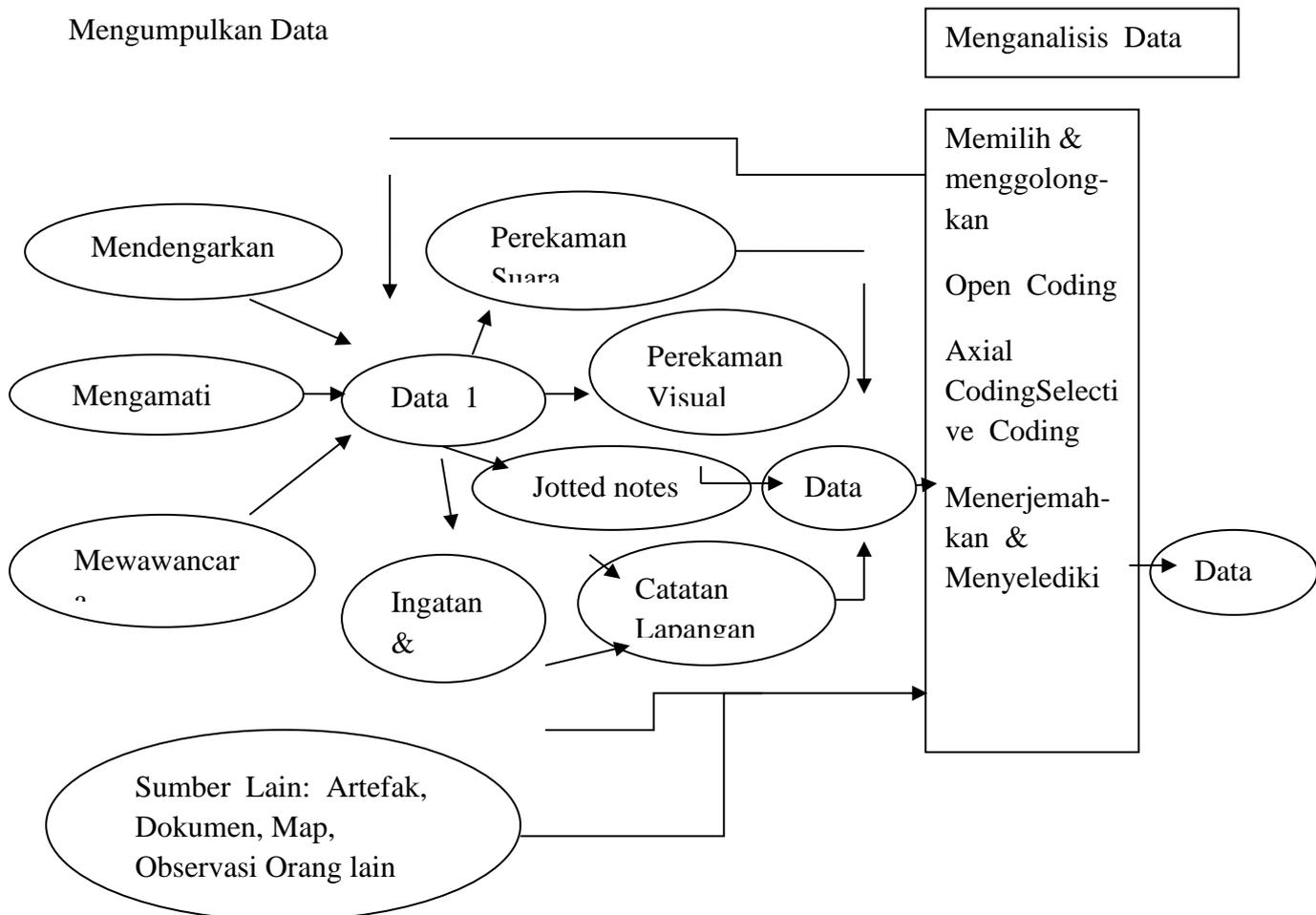
Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip umum Ajaran Sosial Gereja (solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum) dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan religius para pedagang pasar Wamanggu. Selain itu, observasi juga dilakukan bagi pengelola pasar serta para pembeli/pengunjung.

7. Teknik Analisis dan Penafsiran Data

Fokus dari analisa dan penafsiran data ini adalah pertanyaan dan tujuan penelitian ini. Peneliti berusaha mencari pola dalam data berupa perilaku, objek, fase, atau ide berulang, kemudian menafsirkannya menurut teori sosial yang dibangun dan latar tempat berlangsungnya pola dari data tersebut. Neuman (2013:570) menyebutkan bahwa dalam menganalisa data diperlukan “pemeriksaan, pemilahan, penggolongan, evaluasi, perbandingan, sintesis, dan

perenungan data yang dikodekan serta mengkaji data mentah dan data yang direkam.”

Tahapan dalam analisa data digunakan tahapan yang diadaptasi oleh Neuman dan Ellen (1984a:214). Dalam tahapan tersebut data dari penelitian lapangan menjadi data 1 yakni data mentah, pengalaman peneliti yang diperoleh dari mendengarkan, mengamati, dan mewawancarai. Data 2 berupa data yang direkam, catatan pengalaman fisik. Sedangkan data 3 berupa data yang terpilih dan diproses dalam laporan akhir. Untuk lebih jelasnya, proses pengumpulan data dan analisa data dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 1.3 Proses Pengumpulan dan Analisa Data

8. Teknik Meningkatkan Kualitas Penelitian

Penelitian kualitatif yang baik tentunya perlu memperhatikan dan memenuhi standar tertentu, yakni “trustworthiness” atau kepercayaan. Kepercayaan merujuk pada bagaimana memaksimalkan obyektivitas dan meminimalkan bias dalam penelitian kualitatif. Rubin & Babbie (2008:431-433) mengikuti Padgett menawarkan 6 (enam) strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian kualitatif. Pertama, strategi keterlibatan berkepanjangan (*prolonged engagement*). Strategi ini dimaksudkan untuk membangun hubungan yang panjang dan saling percaya antara peneliti dan responden sehingga responden dapat memberikan informasi secara benar dan akurat serta tidak berbohong. Yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam strategi pertama ini adalah tidak over-identifikasi, berusaha agar tetap pada tujuan yang telah ditetapkan, tetap menumbuhkan sikap analitis dan menjaga identitas diri.

Strategi kedua adalah triangulasi. Dalam strategi ini peneliti mencari bukti yang menguatkan antara dua atau lebih sumber untuk data dan interpretasi. Ada 5 (lima) jenis triangulasi dalam penelitian kualitatif, yakni melibatkan beberapa elemen teoretis, menggunakan lebih dari satu metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan beberapa pengamat untuk mengumpulkan data dan beberapa *coders* untuk mengklasifikasikan pengamatan yang dikumpulkan, menggunakan lebih dari satu sumber data (seperti pengamatan langsung, wawancara, dan catatan yang ada), dan menggunakan beberapa disiplin bidang ilmu.

Strategi ketiga adalah *peer debriefing* dan dukungan. Dalam strategi ini tim peneliti bertemu secara teratur untuk memberikan umpan balik, dukungan emosional, dan pemikiran alternatif tentang pengumpulan data dan masalah dan makna dari data yang telah dikumpulkan. Strategi ini merupakan proses pendalaman dan *sharing* informasi antara anggota tim guna meningkatkan obyektivitas dan mengoreksi bias serta masalah lain dalam pengumpulan data dan interpretasi.

Strategi keempat adalah analisa kasus negatif. Dalam strategi ini peneliti menunjukkan bahwa mereka telah mencari secara menyeluruh kasus-kasus yang menyimpang yang tidak sesuai dengan interpretasi peneliti. Strategi kelima adalah memeriksa anggota. Dalam strategi kelima ini peneliti meminta partisipan dalam penelitian mereka untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi keakuratan pengamatan penelitian dan interpretasi peneliti.

Strategi yang terakhir adalah audit. Strategi ini dapat dilakukan ketika peneliti meninggalkan jejak melalui kertas catatan lapangan, transkrip wawancara, jurnal, dan memo, mendokumentasikan keputusan yang dibuat sepanjang penelitian, dan sebagainya. Strategi audit ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kelima strategi sebelumnya telah dilakukan secara benar.

Dari keenam strategi di atas, penelitian yang hendak dilakukan selama bulan November 2015 di pasar Wamanggu Merauke dengan menerapkan strategi triangulasi dengan menggunakan lebih dari satu sumber data, yakni wawancara mendalam, pengamatan/observasi dan dokumentasi yang ada. Penelitian ini juga berada dalam bimbingan dan pendampingan dari dosen

yang ahli dalam bidang ini. Karena itu diharapkan agar penelitian ini dapat memenuhi salah satu standar kualitatif yang ada.

H. Panduan Instrumen Pengumpulan Data

a. Tabel Panduan Observasi

No	Prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja
	Pemahaman Solidaritas
1	Adanya kebersamaan dan kekompakan pedagang
2	Adanya nilai kesetiakawanan
3	Adanya rasa berkorban dalam diri pedagang
4	Adanya partisipasi dalam kerja sama pedagang
5	Adanya tanggung jawab dalam kerja sama
6	Adanya semangat membantu antar pedagang
	Pemahaman Subsidiaritas
1	Adanya bantuan moril/ materi untuk para pedagang
2	Adanya kesempatan bagi pedagang pemulah
3	Adanya nilai kepercayaan antar para pedagang
4	Adanya sikap saling menghargai dan memotivasi
5	Adanya keterlibatan dalam membantu sesama pedagang
6	Adanya sikap menghormati dan menjaga antar pedagang
	Pemahaman Kesejahteraan Umum
1	Adanya kesetaraan hak dan martabat antar para pedagang
2	Adanya keamanan dan kenyamanan antar pedagang
3	Adanya tanggung jawab dalam kerja sama
4	Adanya kesepakatan bersama dalam aktivitas demi tujuan bersama
5	Adanya sarana prasarana yang membantu usaha antar para pedagang
6	Adanya tujuan bersama demi mencapai harta benda sebagai hasil kerja

Keterangan:

Penulis menggunakan panduan di atas untuk melakukan observasi di pasar

Wamanggu Kabupaten Merauke.

b. Panduan Wawancara

➤ Pedagang Pasar Wamunggu

1. Sejauh mana bapak/ibu memahami makna solidaritas?
2. Sejauh mana bapak/ibu memahami makna subsidiaritas?
3. Sejauh mana bapak/ibu memahami makna kesejahteraan umum?
4. Apakah bapak/ibu sudah menerapkan makna solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum diantara sesama pedagang?
5. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat bapak/ibu dalam menerapkan prinsip solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum?

➤ Pengelola Pasar Wamunggu

1. Sejauh mana bapak/ibu memahami makna solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum?
2. Sejauh mana aktivitas dan mekanisme pasar Wamunggu dalam mencerminkan prinsip solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum?
3. Apakah pihak pengelola pasar telah menerapkan prinsip solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum dalam mengelola pasar?
4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan prinsip solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum dalam mengelola pasar?
5. Apa saja harapan bapak/ibu dalam menerapkan prinsip solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum, guna kemajuan pasar kedepan yang lebih baik lagi?

I. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal-skripsi ini dibagi dalam 5 bab. Bab pertama tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metodologi penelitian. Bab kedua berisi landasan teori yang dibangun untuk memberi kerangka bagi analisa temuan lapangan. Bab ketiga berisi hasil penelitian dan pengolahan data dari hasil wawancara mendalam, pengamatan/observasi, dan dokumentasi dari pengelola pasar Wamunggu yang meliputi gambaran umum pasar Wamunggu serta gambaran para pedagang dalam kehidupan sosial, ekonomi dan religius. Bab keempat berisi analisis dan interpretasi data hasil penelitian. Bab lima berisi kesimpulan, rekomendasi dan implikasi pastoral.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Prinsip-Prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja

1. Prinsip Solidaritas

a. Pengertian Solidaritas

Solidaritas berasal dari bahasa latin: “solidus”, Inggris “solidarity” Arab “tadhamun”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa solidaritas diambil dari kata solider yang berarti mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu¹³. Solidaritas dikaitkan dalam kelompok sosial, maka kata solidaritas berarti rasa kebersamaan dalam kelompok tertentu yang menyangkut kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama.

Dalam *ensiklik Sollicitude Rei Socialis, Laborem Exercens* dan *Centesimus Annus*, Paus Yohanes Paulus II menyebut solidaritas sebagai keutamaan hakiki bagi kehidupan sosial. Dimana “solidaritas” bukan perasaan belas kasihan yang tidak jelas atau kesedihan yang dangkal dengan kemalangan begitu banyak orang. Sebaliknya, solidaritas adalah ketetapan hati yang mantap dan tekun untuk mengkomitment-kan diri pada kesejahteraan umum, yaitu pada kebaikan semua orang dan setiap individu¹⁴.

¹³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hlm. 1082

¹⁴ Eddi Kristiyanto, *Diskursus Sosial Gereja* (Malang: Dioma 2006), hlm. 193

Solidaritas dilihat dari pengertiannya adalah sebuah sikap yang menunjukkan rasa mempunyai atau kebersamaan dalam kelompok atau organisasi tertentu, namun tidak hanya sebatas rasa bersedih atau belas kasihan karena penderitaan seseorang. Solidaritas adalah sebuah sikap yang berasal dari hati, untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain dan bukan karena kita menunjukkan kebolehan atau kekuatan kita, akan tetapi solidaritas menjadi sebuah ketetapan hati untuk mau memberikan diri kepada orang lain demi tujuan semua orang dan bukan diri sendiri, tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain.

b. Makna dan Nilai Solidaritas

Solidaritas secara khusus menonjolkan hakikat sosial yang intrinsik dari pribadi manusia, kesetaraan semua orang dalam martabat dan hak-hak serta jalan bersama individu-individu dan bangsa-bangsa menuju kesatuan yang semakin kokoh. Tidak pernah sebelumnya terdapat suatu kesadaran yang tersebar luas mengenai ikatan saling ketergantungan antara individu-individu dan bangsa-bangsa, yang ditemukan dalam setiap tingkatan. Perluasan yang sangat pesat dalam berbagai cara dan sarana berkomunikasi “secara serta merta” seperti yang disajikan oleh teknologi informasi, kemajuan dalam teknologi.

Di hadapan fenomena saling ketergantungan beserta perluasannya yang berkanjang, bercocoklah di setiap belahan dunia berbagai ketimpangan yang sangat mencolok antara negara-negara maju dan

negara-negara sedang berkembang. Ketimpangan yang juga dikobarkan oleh aneka bentuk eksploitasi, penindasan dan korupsi yang memiliki suatu pengaruh negatif terhadap kehidupan nasional dan internasional dari banyak negara. Pencepatan saling ketergantungan antara individu-individu dan bangsa-bangsa perlu dibarengi dengan upaya-upaya yang sama intensifnya pada ranah etika sosial, dalam rangka mencegah akibat-akibat berbahaya dari ketidakadilan yang dilakukan pada sebuah skala global.

Secara khusus solidaritas menunjukkan sikap dasar sosial yang ada dalam diri manusia. Manusia semestinya menjadikan solidaritas sebagai prinsip hidupnya, dimana ada kesetaraan dalam hak dan kewajiban di antara semua manusia tanpa ada perbedaan atau pengecualian. Ketika semuanya itu diperhatikan, maka dapat mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan nasional dan internasional.

c. Solidaritas Sebagai Sebuah Prinsip Sosial dan Kebajikan Moral

Relasi-relasi baru saling ketergantungan antara individu-individu dan bangsa-bangsa, yang senyatanya merupakan bentuk-bentuk solidaritas, harus diubah menjadi relasi-relasi yang diarahkan kepada solidaritas etika sosial yang sejati. Inilah sebuah tuntutan moral yang melekat erat dalam semua relasi manusia. Solidaritas karenanya dilihat di bawah dua segi yang saling melengkapi, yakni sebagai sebuah prinsip sosial¹⁵ dan sebagai sebuah kebajikan moral.

¹⁵ *Katekismus Gereja Katolik* (Ende: Nusah Indah 2007), hlm. 476

“Suatu kekeliruan luas dewasa ini terletak dalam hal ini, bahwa orang melupakan hukum solidaritas dan kasih antar manusia, hukum yang diwajibkan dan ditetapkan baik oleh asal mula bersama dan oleh kodrat akal budi yang sama dari semua manusia, dari segala bangsa, maupun oleh kurban penebusan Yesus Kristus di altar salib kepada Bapa surgawi-Nya demi keselamatan umat manusia yang berdosa” (Pius XII, Ens. “Summi pontificatus”).

Solidaritas terutama mesti dilihat menurut nilai-nilainya sebagai sebuah kebijakan moral yang menentukan tatanan lembaga-lembaga. Berdasarkan prinsip ini “struktur-struktur dosa” yang menguasai relasi antara individu-individu dan bangsa-bangsa mesti diatasi. Struktur-struktur itu mesti dimurnikan dan diubah menjadi struktur-struktur solidaritas melalui penciptaan atau perubahan secara tepat atas perundang-undangan, aturan-aturan pasar serta sistem-sistem hukum (bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik SRS.§.36).

Solidaritas juga sebuah kebijakan moral yang autentik, bukan suatu “perasaan belas kasihan yang samar-samar atau rasa sedih yang dangkal karena nasib buruk sekian banyak orang, dekat maupun jauh. Sebaliknya, solidaritas ialah tekad yang teguh dan tabah untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum, artinya kepada kesejahteraan semua orang dan setiap orang perorangan karena kita semua sungguh bertanggung jawab atas semua orang”. Solidaritas naik kejajaran kebijakan sosial karena ia menempatkan dirinya pada ranah keadilan. Solidaritas adalah sebuah kebijakan yang diarahkan secara tak berbanding kepada kesejahteraan umum, dan ditemukan di dalam “komitmen terhadap kesejahteraan sesama disertai keadilan, yang menurut Injil, untuk ‘kehilangan diri sendiri’ demi sesama alih-alih mengisapnya, dan untuk

'melayaninya' alih-alih menindasnya demi keuntungan sendiri (bdk. Mat 10:40-42; 20:25; Mrk 10:42-45; Luk 22:25-27).

Solidaritas sebagai sebuah prinsip sosial menjamin kemandirian seseorang dan bukan perasaan belas kasihan yang mengarahkan manusia menuju ketergantungan abadi. Ketika seseorang telah mandiri, maka ia akan bekerja dan berusaha dengan modal yang dimiliki serta dapat membantu orang lain. Berdasarkan atas apa yang dimilikinya, seseorang akan berusaha mementingkan kesejahteraan atau tujuan umum dibanding tujuannya sendiri. Memahami dirinya sebagai seorang makhluk sosial yang berlandaskan pada etika moral, maka ia akan menjadikan solidaritas sebagai sebuah kebajikan moral yang menempatkan aktivitasnya pada ranah keadilan, lambat laun akan meninggalkan sikap buruk manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa melihat orang lain.

d. Solidaritas dan Pertumbuhan Bersama Umat Manusia

Pesan Ajaran Sosial Gereja berkenaan dengan solidaritas jelas-jelas menunjukkan bahwa terdapat sebuah ikatan yang sangat erat antara solidaritas dan kesejahteraan umum, antara solidaritas dan tujuan universal harta benda, antara solidaritas dan kesetaraan di antara semua manusia dan bangsa, antara solidaritas dan perdamaian di dalam dunia. Istilah "solidaritas", yang digunakan secara luas oleh magisterium Gereja mengungkapkan secara ringkas kebutuhan untuk mengakui ikatan-ikatan kokoh yang mempersatukan semua orang dan kelompok-kelompok sosial

satu sama lain, ruang yang diberikan kepada kebebasan manusia bagi pertumbuhan bersama di dalamnya semua orang berbagi dan di dalamnya mereka berperan serta (Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik SRS.§. 17-45) Komitmen pada tujuan ini diterjemahkan ke dalam andil positif untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan apa pun dalam hal bersama dan juga mencari titik-titik kesepakatan yang mungkin di mana sikap separasi dan fragmentasi merajalela. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk menyerahkan diri sendiri demi kebaikan sesama, melampaui setiap kepentingan individu dan golongan.

Prinsip solidaritas menuntut agar semua orang pada zaman kita menanamkan suatu kesadaran yang lebih besar bahwa mereka adalah orang-orang yang berhutang pada masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya. Mereka adalah orang-orang yang berhutang karena berbagai kondisi yang membuat keberadaan manusia dapat dihidupi, dan karena warisan yang tak kelihatan namun teramat penting yang dibentuk oleh kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknik, harta benda jasmani dan rohani, serta oleh segala sesuatu telah dihasilkan dari kondisi kemanusiaan. Hutang yang sama mesti diakui di dalam berbagai bentuk interaksi sosial, agar perjalanan umat manusia tidak akan terganggu tetapi tetap terbuka bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, yang semuanya dipanggil untuk bersama-sama berbagi karunia yang sama itu dalam solidaritas.

Melihat fenomena yang terjadi akan pentingnya nilai solidaritas yang menjamin akan keberlangsungan hidup bersama tanpa membedakan latar belakang seseorang. Kepentingan bersama menjadi tujuan utama dari solidaritas, yang di dalamnya terdapat harta benda dan kesuksesan hidup semua orang. Solidaritas dalam pandangan Gereja dapat mempersatukan semua orang dari golongan manapun, mereka semua berperan serta dan berbagi apa yang mereka miliki demi tujuan bersama. Kita mesti memahami masyarakat sebagai fondasi dimana kita berpijak, segala sesuatu yang kita alami saat ini berawal dari masyarakat, oleh karena itu dengan jelas kita berhutang pada masyarakat umum. Hal ini dapat kita bayar, apabila kita mementingkan tujuan universal diatas tujuan pribadi atau golongan, sebab kita semua memiliki tugas untuk berbagi apa yang ada pada kita kepada masyarakat.

e. Solidaritas di dalam Kehidupan dan Pesan Yesus Kristus

Puncak yang tidak dapat ditandingi dari prespektif yang ditunjukkan di sini adalah kehidupan Yesus dari Nazaret, Manusia Baru, yang bersatu dengan umat manusia bahkan hingga “sampai mati di kayu salib” (lih, Flp 2:8). Di dalam Dia selalu terbuka kemungkinan untuk mengenal tanda nyata dari cinta kasih Allah-beserta-kita yang tiada terukur dan melampaui segala-galanya, yang mengenakan kelemahan-kelemahan umat-Nya, berjalan bersama mereka, menyelamatkan mereka

serta mempersatukan mereka¹⁶. Di dalam Dia dan berkat Dia, kehidupan di tengah masyarakat pun, walaupun ada serba pertentangan dan kemenduaan, bisa ditemukan kembali sebagai suatu tempat kehidupan itu merupakan sebuah tanda rahmat yang senantiasa ditawarkan kepada semua orang dan karena kehidupan itu merupakan sebuah undangan kepada bentuk-bentuk berbagi yang lebih tinggi dan lebih terlibat.

Yesus dari Nazaret membuat kaitan antara solidaritas dan cinta kasih bersinar cemerlang di depan semua orang, seraya menerangi keseluruhan makna kaitan ini (bdk. Yoh 13:35). “ Dalam terang iman, solidaritas berusaha melampaui diri, mengenakan matra-matra khas Kristen yakni kemurahan hati yang sepenuhnya, pengampunan dan pendamaian. Sesama bukan melulu manusia beserta hak-haknya sendiri dan kesetaraan mendasar dengan manusia lain mana pun juga, melainkan menjadi citra yang hidup menyerupai Allah Bapa, ditebus berkat darah Yesus Kristus, dan tiada hentinya diliputi oleh tindakan Roh Kudus. Oleh karena itu, sesama harus dikasihi, juga kalau ia seorang musuh, dengan cinta yang sama seperti kasih Tuhan sendiri terhadapnya. Dan demi sesama itu, orang harus bersedia berkorban, bahkan sampai tuntas: menyerahkan nyawanya demi saudara-saudaranya (lih. 1Yoh 3:16).

¹⁶ Dokumen Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*. art.32

2. Prinsip Subsidiaritas

a. Pengertian Subsidiaritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “subsidi” adalah pemberian bantuan, serta menumbuhkembangkan kemampuan yang telah ada dengan mendukung serta memotivasi. Subsidiaritas menjadi jaminan utama dalam kebersamaan. Semua orang saling menghargai, memberikan kepercayaan secara penuh kepada orang lain tanpa membedakan berdasarkan suku dan ras atau keyakinan. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian dari orang lain maupun pihak-pihak terkait. Subsidiaritas merupakan pemberian bantuan kepada seseorang baik moril maupun materil yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut agar berusaha menjalankan aktivitas dan kerjanya.

b. Asal Usul dan Makna Prinsip Subsidiaritas

Subsidiaritas terbilang di antara prinsip-prinsip yang paling tetap dan khas dari Ajaran Sosial Gereja, dan selalu ada sejak ensiklik sosial agung yang pertama. Tidaklah mungkin memajukan martabat pribadi tanpa menunjukkan kepedulian terhadap keluarga, kelompok-kelompok, paguyuban-paguyuban, kenyataan teritorial setempat. Singkatnya, apa saja yang menyokong bentuk ungkapan di bidang ekonomi, sosial, budaya, olahraga, rekreasi, profesi dan politik, untuknya orang-orang secara spontan terlibat dan yang memungkinkan mereka untuk menanggapi

pertumbuhan sosial secara efektif¹⁷. Inilah ranah masyarakat sipil, yang dipahami sebagai keseluruhan jumlah relasi di antara individu-individu dan pengelompokan-pengelompokan sosial perantara, yang merupakan relasi pertama yang muncul dan yang terwujud berkat “kemandirian kreatif warga negara”(bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik SRS.§.15). Jejaring relasi ini memperkokoh tenunan sosial dan menjadi pijakan untuk suatu persekutuan sejati di antara pribadi-pribadi, seraya memungkinkan pengakuan atas bentuk-bentuk kegiatan sosial yang lebih tinggi¹⁸.

Keniscayaan membela dan memajukan bentuk-bentuk asli kehidupan sosial ditekankan oleh Gereja di dalam *Ensiklik Quadragesimo Anno*, dimana prinsip subsidiaritas ini ditunjukkan sebagai suatu prinsip paling penting dari “filsafat sosial”. “Seperti kelirulah merebut dari orang perorangan dan mempercayakan kepada masyarakat apa yang dapat dilaksanakan oleh daya upaya dan usaha swasta, begitu pula tidak adillah, suatu kesalahan yang berat dan gangguan tata tertib yang wajar. Sebab setiap kegiatan sosial pada hakikatnya harus menyelenggarakan bantuan bagi para anggota lembaga sosial, dan jangan pernah menghancurkan dan menyerap mereka¹⁹.

Berdasarkan prinsip ini, semua lembaga dari satu tatanan lebih tinggi mesti menerapkan perilaku menolong (*subsidium*), karenanya mendukung, memajukan, mengembangkan terhadap satuan-satuan sosial perantara dapat secara tepat melaksanakan fungsi-fungsi yang diembankan

¹⁷ *Katekismus Gereja Katolik*. art. 1882.

¹⁸ Paus Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*. art . 49

¹⁹ Charles Curran, *Buruh, Petani, Dan Perang Nuklir* (Yogyakarta: Kanisius 2007), hlm. 88-89

kepadanya tanpa dipaksa untuk mengalihkannya atau memberikan secara tidak adil kepada satuan-satuan sosial lain dari tatanan lebih tinggi, yang menyebabkan satuan-satuan sosial perantara tadi akan terpuruk karena diserap dan digantikan, sehingga pada akhirnya menyaksikan bagaimana martabat serta tempat mereka yang secara hakiki diingkari.

Subsidiaritas, yang dipahami dalam arti positif sebagai bantuan ekonomi, kelembagaan atau hukum yang ditawarkan kepada satuan-satuan sosial dari tatanan lebih rendah, mencakup rangkaian implikasi negatif bersepadanan yang menentukan negara untuk tidak melakukan apa pun juga yang nyata-nyata membatasi ruang keberadaan dari sel-sel hakiki yang lebih kecil dari masyarakat. Prakarsa, kebebasan serta tanggung jawab sel-sel tersebut mesti tidak boleh digantikan.

c. Petunjuk-petunjuk Konkret Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas melindungi orang dari penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas sosial dari tatanan lebih tinggi dan meminta otoritas yang sama untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok perantara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Prinsip ini adalah imperatif karena setiap pribadi, keluarga dan kelompok perantara memiliki sesuatu yang asali untuk diberikan kepada masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa pengingkaran atas prinsip subsidiaritas, atau pembatasan terhadapnya atas nama apa yang disangka demokratisasi atau kesetaraan semua anggota masyarakat, justru

mengekang dan malah tidak jarang merusakkan semangat kebebasan dan berprakarsa.

Prinsip subsidiaritas bertentangan dengan bentuk-bentuk tertentu dari sentralisasi, birokratisasi serta bantuan kesejahteraan, dan juga dengan kehadiran negara yang tidak sah serta berlebih-lebihan di dalam mekanisme publik. Negara bercampur tangan secara langsung dan dengan demikian merebut tanggung jawab masyarakat, negara, bantuan sosial menekankan daya kekuatan sosial dan manusiawi. Lambat laun mengakibatkan munculnya semakin banyak dinas pemerintah, yang sering kali lebih dikemudikan oleh sistem-sistem birokrasi daripada oleh kepedulian untuk sungguh-sungguh melayani anggota masyarakat, dan yang disertai dengan pembiayaan yang besar (CA.§.48).

Dalam rangka menerapkan prinsip subsidiaritas, terdapat sebuah kebutuhan yang sepadan, yaitu menghormati dan secara efektif memajukan pribadi manusia dan keluarga. Penghargaan terhadap serikat-serikat dan organisasi-organisasi perantara dapat dilimpahkan kepada pihak-pihak lain. Mendorong prakarsa swasta sehingga setiap satuan sosial tetap melayani kesejahteraan umum masing-masing sesuai dengan ciri khasnya yang berbeda. Adanya kemajemukan di tengah masyarakat, menjaga dan membela hak asasi manusia dan hak kaum minoritas. Mengupayakan desentralisasi birokrasi dan administrasi. Mengupayakan keseimbangan antara ranah publik dan ranah privat. Metode-metode yang

cocok untuk membuat warga negara lebih bertanggung jawab “menjadi bagian” yang aktif dari realitas politik dan sosial di negara mereka.

Implikasi khas dari prinsip subsidiaritas adalah keterlibatan (bdk. Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*: § 22). Yang secara hakiki diungkapkan dalam serangkaian kegiatan melaluinya seseorang warga negara, entah sebagai individu atau dalam kerja sama dengan orang-orang lain, entah secara langsung atau melalui perwakilan, memberi andil bagi kehidupan budaya, ekonomi, politik dan sosial masyarakat sipil dimana ia menjadi anggotanya. Keterlibatan adalah tugas yang mesti dipenuhi secara sadar oleh setiap orang, dengan rasa tanggung jawab dan dengan maksud demi kesejahteraan umum (Katekismus Gereja Katolik.§.1993).

3. Prinsip Kesejahteraan Umum

a. Pengertian Kesejahteraan Umum

Prinsip kesejahteraan umum, padanya setiap segi kehidupan sosial mesti dikaitkan agar ia dapat menggapai maknanya yang paling penuh, berasal dari martabat, kesatuan serta kesetaraan semua orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesejahteraan” dilihat sebagai keamanan, kenyamanan, kemakmuran dan ketentraman semua orang. Berdasarkan artinya yang utama dan luas diterima. Kesejahteraan umum merujuk pada “keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai

kesempurnaan mereka sendiri²⁰. Dalam UUD 1945, alinea ke-4 (empat) serta poin ke-5 (lima) Pancasila yang berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, semestinya dijadikan pedoman guna mencapai cita-cita luhur tersebut.

b. Makna dan Implikasi-implikasinya yang Utama

Kesejahteraan umum bukan merupakan sekadar penjumlahan kesejahteraan partikular dari setiap subjek dalam sebuah satuan sosial. Karena menjadi milik semua orang dan setiap pribadi, maka kesejahteraan umum tetap tinggal “umum”, sebab ia tidak dapat dipecahkan dan karena hanya secara bersama menjadi mungkinlah untuk menggapainya, meningkatkannya dan mengamankan efektivitasnya, yang berkenaan pula dengan masa depan. Sama halnya dengan tindakan-tindakan moral dari seorang individu dicapai dengan melakukan apa yang baik, demikian pula tindakan-tindakan sebuah masyarakat menggantung ketinggiannya yang penuh apabila tindakan-tindakan tersebut mendatangkan kesejahteraan umum, sehingga kesejahteraan umum dapat dipahami sebagai *matra* sosial dan *komunal* dari kebaikan moral.

Sebuah masyarakat yang ingin dan bermaksud tetap melayani manusia pada setiap tingkatannya adalah masyarakat yang memiliki kesejahteraan umum-kesejahteraan semua orang dan kesejahteraan seluruh pribadi²¹. Sebagai sasaran utamanya, pribadi manusia tidak dapat menemukan kepenuhannya di dalam dirinya sendiri, artinya terlepas dari kenyataan bahwa ia bersedia “bersama” yang lain dan “untuk” yang lain.

Kebenaran ini tidak semata-mata menuntut bahwa ia hidup bersama yang lain pada tingkat kehidupan sosial, tetapi bahwa ia mengikhtiarkan

²⁰ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*.art.75

²¹ *Katekismus Gereja Katolik*.art. 1992

dengan tiada henti-hentinya pada praktik aktual atau *action* dan bukan melalui teori semata. Dengan kata lain makna kebenaran dapat ditemukan langsung dalam bentuk-bentuk kehidupan sosial yang ada atau praktek dan pengalaman langsung di lapangan (bdk. Yohanes XXIII, *Ensiklik Pacem in Terris*.§. 55).

c. Tanggung Jawab Setiap Orang Bagi Kesejahteraan Umum

Tuntutan-tuntutan menyangkut kesejahteraan umum bergantung pada kondisi-kondisi sosial dari setiap kurun historis dan terkait secara erat dengan penghormatan terhadap penggalakan atas pribadi dan hak-hak dasarnya²². Tuntutan-tuntutan ini tidak terlepas pada, perdamaian, penataan kekuasaan negara, sistem peradilan yang sehat serta penyediaan pelayanan yang hakiki kepada semua orang. Yang beberapa dari antaranya adalah hak asasi manusia: makanan, perumahan, pekerjaan, pendidikan dan akses pada kebudayaan, transportasi, perawatan kesehatan dasar, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, serta perlindungan terhadap kebebasan beragama²³.

Kesejahteraan umum karenanya mencakup semua anggota masyarakat, tak ada satu pun yang dikecualikan dari kerja sama, seturut kemampuannya masing-masing orang, dalam menggapai dan mengembangkannya. Setiap orang juga berhak untuk menikmati kondisi-kondisi kehidupan sosial yang dihasilkan oleh pencarian akan kesejahteraan umum. Ajaran Paus Pius XI masih tetap relevan: tentang pemerataan harta benda tercipta dimana semua orang bernalar tahu,

²² *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*.hlm. 113

²³ Thomas Rausch, *Katolisisme* (Yogyakarta: Kanisius 2001),hlm 248-249

dewasa ini mengalami situasi yang buruk sekali akibat perbedaan amat besar antara kelompok kecil yang kaya raya dan mereka yang serba tak empunya dan tak terbilang jumlahnya, harus dikembalikan pada kesesuaian dengan norma-norma kesejahteraan umum, yakni keadilan sosial (bdk. Yohanes XXIII, *Ensiklik Mater et Magistra*.§.46)

d. Tugas-Tugas Masyarakat Politik demi Kesejahteraan Umum

Tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan umum, di samping jatuh ke masing-masing pribadi, juga menjadi milik negara, sehingga kesejahteraan umum adalah alasan politik itu ada. Negara malah mesti menjamin kehorensi, kesatuan dan penataan masyarakat sipil karena negara adalah bentuk lahiriah dari masyarakat sipil itu²⁴. Dalam rangka agar kesejahteraan umum bisa digapai dengan sumbangsih setiap warga. Guna menjamin kesejahteraan umum, Pemerintah setiap negara memiliki kewajiban khusus untuk menyelaraskan berbagai kepentingan sektoral yang berbeda-beda dengan tuntutan keadilan (bdk. Katekismus Gereja Katolik.§.1908).

Kesejahteraan umum masyarakat bukanlah tujuan di dalam dirinya sendiri ia memiliki nilainya hanya dalam rujukan pada pencapaian tujuan-tujuan tertinggi pribadi serta kesejahteraan umum universal dari segenap ciptaan. Allah adalah tujuan terakhir dari makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Dalam hal ini dengan alasan apapun juga kesejahteraan umum tersebut tidak dapat dipisahkan dari *matra transendennya*, yang bergerak

²⁴ Dokumen Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral GS*.art.74

melampaui *matra historis* seraya pada saat yang sama menggenapkannya (bdk. CA.§. 41. AAS.§.83).

Semua orang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pribadi adalah subyek utama untuk menjalankan tugas tersebut demi tujuan bersama. Kesejahteraan umum telah diatur di dalam setiap negara sebagai bentuk lahiriah dari masyarakat. Negara menjamin dan melindungi setiap waraganya, sehingga kesempurnaan kesejahteraan bersama akan berada dalam diri Allah sendiri, yang telah melengkapi hidup manusia dengan menebus dosa manusia dalam diri Putera-Nya sebagai kepenuhan akan janji untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kemiskinan.

B. Ensiklik Laborem Exercens

Ensiklik Bapa Suci Yohanes Paulus II (14 September 1981) perihal pekerjaan insani bergandengan dengan konteks evolusi dalam masyarakat yang bercorak ganda. Ensiklik ini pertama berbicara mengenai evolusi masyarakat, yang kedua evolusi Gereja.

1. Terbentuknya Dokumen LE (Laborem Exercens)

Berangkat dari visi Gereja, diperkaya dengan acuan alkitabiah dan dukungan dari dokumen-dokumen ajaran sosial Gereja sebelumnya, Sri Paus mengembangkan karya pribadi. Terkesan sangat kuat bahwa *LE* adalah jejak-jejak kepribadiannya, dan tentu saja sebagian terbesar teks *LE* adalah hasil permenungan dan tulisan dia sendiri. Kita mendapatkan

gayanya yang khas, lugas dan terkadang repetitif. Teknik repetisi mengandung maksud pedagogis, yakni demi mengartikulasikan sejumlah bab *LE* yang berbeda. Sebagaimana kita menemukan dalam *Redemptor hominis* dan *Dives in misericordia* demikian pula dalam *LE* terdapat retasan filosofis, yang lebih dekat pada ontologi daripada suatu analisis yang memanfaatkan pelbagai ilmu pengetahuan sosial. *LE* dihidupkan oleh dua pengalaman pribadi yang sangat berbeda. Pertama-tama, sejak masa muda Sri Paus mengenal pekerjaan kaum buruh di aneka pertambangan di negeri asalnya, Polandia. Ia berangkat dari pengalaman konkret dan dari keadaan senasib sepenanggungan. Ditegaskannya, “Dalam perjalanan hidup saya beruntung, lantaran rahmat Allah, menemukan kebenaran-kebenaran fundamental tentang kerja insani ini dalam pengalaman kerja tangan pribadi.”

Kedua, Yohanes Paulus II mengalami hidup di Polandia, di mana rezim komunis mempraktikkan struktur-struktur kerja kolektif. Sri Paus menilai hasil-hasil dari suatu sosialisasi ekstrem dari sarana-sarana produksi dan menolak penyalahgunaan dari suatu sentralisasi birokratis dan negara. Refleksi yang dimuat dalam *Kerja dan Property* (14) sarat dengan fakta yang dia alami di Polandia. Dengan cara yang lebih langsung lagi, ensiklik menarik ilham dari pidato-pidato serta khotbah-khotbah yang diucapkannya selama perjalanannya mengunjungi jemaat Katolik khususnya di hadapan para buruh pabrik atau pertanian di Polandia, Brasil, Mexico, Filippina dan Perancis hingga para buruh imigran. Sejumlah

sambutan yang dia lakukan kemudian diolah kembali, dirumuskan kembali sehingga menjadi sebagian kerangka dari ensiklik. Oleh karenanya ensiklik ini mengesankan suatu teks sintesis yang ditujukan pada publik yang sangat luas. Akhirnya, Sri Paus tidak lupa menambahkan kutipan-kutipan biblis dan mengaitkan dengan keterbukaan teologis dan spiritual. Konon sejak di Polandia dia sudah terbiasa menggunakan dan mempelajari dengan sungguh-sungguh bab-bab pertama kitab Kejadian. Dalam kitab ini (sejauh itu tersurat pula dalam ensiklik) Sri Paus memusatkan perhatian pada istilah-istilah kuasailah bumi, juga jika kata-kata ini tidak mengacu secara langsung dan gamblang pada kerja (bdk. 4,2).

Selain itu ia juga melihat dalam pekerjaan manusia suatu peran serta pada karya penciptaan Allah (26). Sri Paus menghubungkan paham kerja dengan misteri iman Kristen (yakni dalam terang salib dan kebangkitan Kristus, art. 27). Dan karena itulah, bab V yang berjudul Unsur-unsur bagi spiritualitas kerja, memberikan suatu fundamen sekaligus prospek yang sangat luas. Bagi Sri Paus, tugas Gereja adalah melakukan formasi demi terciptanya spiritualitas kerja demi membantu semua orang mendekati diri kepada Allah, Sang Khalik, untuk ikut serta dalam rencana-rencana penyelamatan Allah dalam tataran insani dan dunia dan memperdalam persahabatan dengan Kristus melalui pekerjaan mereka. (LE 24,2). Kesimpulan spiritual ini boleh disebut sebagai ciri khas Sri Paus. Jadi, kata-katanya berangkat dari gerakan batiniah kontemplasi dan (dalam kunjungan-kunjungan ke pelbagai negara) ia senang

mengakarkannya pada ekaristi yang dirayakan bersama dengan Umat Allah. Jadi, teks, atau kata-katanya, dijahit dengan seluruh kebenaran dalam tatapannya.

Tentu saja sejumlah konsep pemikiran yang baru, misalnya pemberi kerja langsung dan tidak langsung, tidak mudah diterima atau dimengerti begitu saja. Tetapi teks *LE* tidak berlarut-larut dalam menjelaskan secara tepat konsep tersebut. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa *LE* menyibakkan optimisme menyeluruh yang didasarkan pada iman Kristen. Ia juga tidak melewatkan begitu saja aspek-aspek kerja yang tidak menyenangkan: Setiap pekerjaan entah itu kerja tangan entah intelektual-secara tidak terelakkan mengandung susah payah. (bdk. 27,1). Pastilah tidak terelakkan adanya salib dalam spiritualitas kerja (bdk. 27,5). Demi menandai kemungkinan adanya konflik yang muncul dalam kerja, Sri Paus menggarisbawahi aspek-aspek positif dari kerja, misalnya sebagai ekspresi kemanusiaan, ungkapan prakarsa, kepribadian, sumber kehidupan keluarga, persaudaraan dan pembentuk komunitas insani. Tegasnya Sri Paus bermaksud membentuk suatu rumusan yang baru tentang kerja. Ia memaklumkan Injil tentang Kerja.

a. Evolusi Masyarakat

Pada dekade-dekade terakhir abad XX (dua puluh), masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang mendasar terutama yang berkenaan dengan jenis (bentuk) pekerjaan. Gereja sendiri mengenali perubahan-perubahan tersebut; dipengaruhi oleh perubahan-perubahan, sehingga dalam refleksi imannya Gereja memperhitungkan kenyataan tersebut. Beberapa pokok dapat diutarakan berikut ini.

1) Kemajuan Teknologi

Teknologi yang lebih modern, khususnya bidang elektronika, memperkenalkan proses-proses kerja seperti misalnya informatika, telematika, mikroproses, dlsb. Semua kemajuan ini diterapkan pula dalam produksi, dalam struktur-struktur, dalam relasi-relasi kerja. Mengesankan bahwa transformasi ini seperti yang terjadi dalam proses industrialisasi dalam abad XIX yang baru lalu. Tugas dan kewajiban Gereja adalah untuk memperjelas bukan dengan analisis ilmiah dari konsekuensi-konsekuensi yang disebabkan oleh perubahan tersebut, melainkan relasi fundamental antara manusia dan kerja dalam konteks suasana dalam masyarakat yang serba baru ini. Pergeseran-pergeseran nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat menuntut suatu penyesuaian orang perorangan bukan hanya dalam hubungan mereka dengan alam dan organisasi, tetapi juga dalam hubungan timbal balik antar-manusia. Gereja bermaksud untuk ambil bagian dalam mengisahkan terciptanya kemungkinan tersebut.

2) Pemecahan Masalah

Ensiklik LE mengungkap sikap terbuka yang sudah diawali pada tahun 1967. Dimana masalah sosial, berkenaan secara khusus dengan dunia kaum buruh dan masih dalam lingkup nasional, kini sudah merembet ke dunia yang lebih luas. Sebab masalah tersebut mempunyai dimensi internasional, bahkan *mondial* (mencakup seluruh dunia). Masalah *kelas* pada suatu waktu menjadi isu dan masalah dunia (LE 2,4). Akibatnya untuk mendapatkan pemecahan atasnya, khususnya untuk masalah pengangguran, dilontarkan himbuan untuk mengadakan kerjasama internasional, misalnya melalui persetujuan atau perjanjian antar-negara dan prakarsa-prakarsa organisasi-organisasi internasional (LE 18,3).

3) Suatu Perubahan

Perubahan yang disinyalir pula (dalam bab III) berkenaan dengan hubungan antara modal dan kerja dalam tahap aktual sejarah bangsa manusia. Situasi yang (dapat) memancing konflik sebagaimana ditafsirkan oleh Karl Marx dan Friederich Engels {yang melihat perjuangan kelas sebagai jalan satu-satunya untuk menyingkirkan ketidakadilan kelas-kelas dalam masyarakat} mendapatkan ungkapan-nya dalam konflik ideologi antara liberalisme, yang dimengerti sebagai ideologi *kapitalisme*, dan *marxisme*, yang dimaksudkan sebagai ideologi sosialisme ilmiah dan komunisme (LE 14,4). Tetapi di negara-negara di mana rezim komunis berkuasa martabat kerja memperlihatkan tidak lebih baik dijunjung-tinggi dan dijamin misalnya

dengan kolektivitas sarana produksi. Solusi yang dimajukan oleh ideologi-ideologi revolusioner itu ilusi, menyesatkan dan gagal. Untuk menjelaskan situasi-situasi konflik tersebut kiranya tepat jika orang kembali berefleksi secara mendalam tentang manusia, baru kemudian tentang kerja.

b. Evolusi Gereja

LE menandai peringatan ulang tahun ke-90 *RN*. Paus Yohanes Paulus II membuat serial kenangan 40 tahun atas *RN* dalam *QA* (Pius XI); ke-60 dalam *MM* (Yohanes XXIII) dan ke-80 dalam *OA* (Paulus VI), tanpa pernah melupakan pesan radio Pius XII, 1941. Acuan *LE* ditujukan pula pada GS (1965), Konsili Vatikan II serta *PP* (1967). Untuk meringkaskan warisan berharga berkenaan dengan 100 tahun ajaran sosial Gereja ini Yohanes Paulus II mendasarkan refleksinya tentu saja pada Injil (Kabar Gembira). Ia juga memperhatikan prakarsa dan kerja yang selama ini dihasilkan oleh komisi kepausan *Iustitia et Pax* bersama dengan organisasi-organisasi yang digalang dalam lingkungan sejumlah konferensi para uskup (bdk. *LE* 2,2). Oleh karena itu *LE* menjelaskan pula kompleks kerja dan pengalaman Umat Allah. Secara terang-terangan Yohanes Paulus II menegaskan bahwa ia ingin membuat relasi organik dengan semua tradisi pengajaran dan prakarsa-prakarsa yang sudah ada (bdk. *LE* 2,1). Tetapi ia tidak mengulang apa yang sudah dikatakan orang/lembaga lain, melainkan menyingkapkan keyakinan pribadinya bahwa kerja manusia adalah kunci masalah, bahkan kunci yang

hakiki seluruh masalah sosial (bdk. LE 3,2). Kerja dalam perspektif Yohanes Paulus II malahan dianggap sebagai kodrat manusia.

Kerja selain itu juga menjadi dasar kehidupan keluarga dan masyarakat. Mungkin tidak berlebihan dikatakan bahwa ensiklik ini berbicara tentang Injil Kerja, yang sebenarnya sudah disingkapkan pada bab-bab perdana dari Kitab Kejadian. Paus menegaskan ulang soal itu terutama dengan bahasan khusus di bawah judul Kristus, Manusia kerja.

2. Struktur dan Argumentasi Laborem Exercens

a. Pokok-pokok Pemikiran

LE memusatkan diri pada satu tema, yakni kerja manusia atau lebih baik manusia yang bekerja (demi setia pada terjemahan dari bahasa Latin *Laborem exercens homo*). Dapat dilacak di sini segala refleksi Yohanes Paulus II: manusia, pusat setiap dan semua aktivitas.

Berangkat dari konsep ini, ensiklik mengembangkan diri dalam dimensi yang lebih luas. Panorama historis mempunyai tempat bagi terbukanya diri seseorang akan masa yang akan datang. Sejumlah aspek historis itu bagi manusia masih tersembunyi dan tidak dikenal (bdk. 4,3). Kendati ada pelbagai perbedaan dalam macam dan bentuk pekerjaan (seturut zaman dan peradaban), tetapi ada prinsip kesatuan dari pekerjaan. Dengan bekerja manusia mengungkapkan martabatnya. Prinsip kesatuan itu tidak mengindahkan bentuk-bentuk kerja misalnya: kerja mandiri atau diupahi (disuruh), kerja

tangan atau intelektual, bercocok tanam atau industri, dikerjakan oleh pria atau perempuan (termasuk ibu rumah tangga), dilakukan oleh penderita cacat atau abnormal. Demikian pula yang berkenaan dengan *jabatan* sebagai: karyawan, pemimpin, pengajar, peneliti. Semua diversitas ini menampakkan suatu kesatuan dari konsep.

Dalam visi tersebut ada tiga hal dasarnya yang didiskusikan dan yang merupakan struktur dokumen. Pokok pertama membedakan, tanpa memisahkan, dua aspek kerja dalam artian objektif, teknik, dan kerja dalam artian subjektif, manusia subjek kerja. Dikatakan Sebagai pribadi, manusia adalah subjek kerja (*LE 6,2*). Kerja itu memiliki martabat sejauh merupakan aktivitas manusia. Mengalir dari sini suatu penolakan segala sesuatu yang datang untuk mengganggu hirarki otentik dari nilai-nilai. Gangguan itu datang dari misalnya pemikiran ekonomis dan materialis, yakni jika kerja dianggap hanya merupakan sarana produksi, dilaksanakan demi nilai-nilai yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebaliknya, pekerjaan adalah sesuatu yang baik bagi manusia. Melalui pekerjaan manusia tidak hanya mengubah kodrat, tetapi juga mewujudkan dirinya sendiri dan membangun masyarakat keluarga dan bangsa.

Pokok kedua membicarakan tentang hubungan antara modal dan kerja. Setelah suatu sintesis historis singkat tentang situasi konflik abad XIX (konflik sosio-ekonomis yang kemudian berubah menjadi konflik ideologis) dan eksplorasi dari pemikiran marxis, Yohanes Paulus II menolak pendekatan-

pendekatan yang sesat ekonomisme dan materialisme. Ia menegaskan, bahwa modal dan kerja tidak dapat dipertentangkan begitu saja. Kedua unsur itu mengandung faktor saling-melengkapi dalam visi teologis maupun humanistik.

Selain itu, Yohanes Paulus memberikan suatu arti ekstensi atas modal. Modal dimaksudkan pertama-tama investasi yang dinyatakan dalam sarana-sarana produksi, termasuk juga misalnya *property* pribadi, otoritas umum-kolektif. Termasuk dalam modal adalah teknologi dan pengetahuan dan lebih luas lagi segala sesuatu (alamiah) yang diselenggarakan oleh Sang Khalik. Perspektif ini hendak menjelaskan hubungan antara kerja dan *property*. Sekaligus mengungkap batas-batas suatu sosialisasi dan modal entah yang cenderung pada nasionalisasi entah hak eksklusif dari hak pribadi dari sarana produksi. Hak milik pribadi itu ibarat dogma yang tidak dapat disentuh kehidupan ekonomi (bdk. *LE* 14,4). Pokok ketiga punya sasaran hak-hak manusia, suatu tema yang sangat disenangi oleh Sri Paus. Ia menetapkan hak-hak kaum buruh yang mencakup hak untuk bekerja, hak atas upah dan hak berperan serta.

b. Skema dan Pengaruh LE

1. Skema LE adalah sebagai berikut:

- a) **I. : Kerja dan Manusia (4-10)**
- b) **II. : Konflik antara Kerja dan Modal dalam tahap sejarah insani**
- c) **III. : Hak-hak pekerja (16-23)**
- d) **IV. : Arti Rohani Pekerjaan (24-27).**

2. Pengaruh *LE*

LE sebenarnya dibuat sebagai kenangan atas 90° tahun *RN* (15 Mei). Tetapi penerbitannya terpaksa ditangguhkan hingga 14 September. Sebab seseorang warga Turki (kaki tangan Badan Inteligen Uni Sovyet, KGB) mencederainya dalam upaya pembunuhan terhadap mendian Bapa Suci Yohanes Paulus II di Piazza Santo Petrus, 13 Mei 1981. Kaum buruh dan perserikatan buruh menyambut dengan entusias *LE*, yang menggarisbawahi martabat dan tindakan mereka. Sejumlah perserikatan buruh juga kecewa lantaran dalam *LE* tidak ditemukan analisis konfliktual ideologis berkenaan dengan hubungan kerja dan modal yang menyebabkan perjuangan antarkelas.

Para pemimpin tanggap pula akan pembedaan baru yang dikemukakan oleh *LE*: pemberi pekerjaan langsung dan tidak langsung. Selain itu, juga pembagian tanggung jawab antara Serikat Buruh dan pemilik perusahaan. Kosa kata, bentuk-bentuk pemikiran, pendekatan-pendekatan filosofis dan teologis dapat membuyarkan para pembaca yang terlalu tergesa-gesa melahap dokumen ini tanpa ikhtiar untuk mencernanya dengan cermat. Tetapi metode repetitif-pedagogis sedikit banyak membantu pembaca menangkap isi keseluruhan *LE*.

C. Jenis-jenis Pasar dan Pandangan Gereja tentang Pasar

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional yang ditandai dengan pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Pasar tradisional berlangsung proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli serta harga barang bukan merupakan harga tetap. Pasar tradisional memiliki keunikan tersendiri, dimana tidak ditutupnya ruang gerak dalam melakukan transaksi jual beli. Disimpulkan bahwa pasar tradisional menjual barang yang tradisional sampai pada barang modern serta pasar tradisional tidak memandang situasi dan lokasi.

Umumnya, pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga. Lokasi pasar tradisional dapat berada di tempat yang terbuka bahkan dipinggir jalan. Ciri-ciri pasar tradisional adalah proses jual-beli melalui tawar menawar harga. Harga yang relatif lebih murah disbanding pasar modern.

2. Pasar Modern

Pada dasarnya pasar modern tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli bisa melihat lebel harga yang tercantum dalam barang (barcode). Pasar modern memiliki ketentuan dan peraturan yang menjamin aktivitas dan regulasi pasar yang teratur, misalnya tentang harga barang yang tidak menjamin penawaran, harga barang bersifat tetap,

bahkan pasar modern selalu memperhatikan waktu dan situasi serta lokasi yang layak untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

Ciri-ciri utama pasar modern adalah harga yang sudah tertera dan diberi barcode, barang yang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama. Pasar modern berada dalam ruangan atau bangunan serta pelayanannya dilakukan sendiri (swalayan). Tempat juga bersih serta nyaman dan tidak terkena terik matahari. Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang. Pembayaran juga dilakukan dengan membawa barang ke cashier dan tidak ada tawar menawar lagi.

3. Pandangan Gereja Tentang Pasar

Secara garis besar, Gereja sangat prihatin atas penggunaan pasar yang dikuasai oleh segenap kelompok atau pemilik modal besar. Gereja secara terang-terangan menyoroti kapitalisme atau sistem perekonomian yang menomorsatukan kepentingan sendiri tanpa melihat penderitaan sesamanya (bdk. *Centesimus Annus/CA* 10:13). Dalam hal ini pasar adalah tempat bagi manusia untuk mengembangkan usahanya tanpa terkecuali. Gereja sangat menghargai peran para pedagang dalam membantu melancarkan ekonomi dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui pasar. Bagi Gereja, pasar harus dijadikan sebagai tempat setiap orang melakukan usaha dengan menghormati norma-norma yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Dimana yang kuat (bermodal besar) harus membantu sesamanya.

D. Pengertian Modal serta Pandangan Gereja tentang Modal dan Kerja

1. Pengertian Modal

Menurut Kamus Bahasa Indonesia “ Modal” adalah “ uang pokok” atau uang dasar dalam menjalankan usaha”. Sedangkan modal dalam arti pasar atau ekonomi adalah”dasar”kaki” yang memiliki banyak arti yang berhubungan dengan ekonomi, *finansial dan accunting*. Modal adalah dasar usaha seseorang dalam menjalankan usahanya.

2. Jenis-jenis Modal

a. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang dimiliki oleh pedagang atau pengusaha itu sendiri. Dimana dasar usahanya berdasarkan pada kekuatan modal. Seorang pedagang memiliki modal awal diperoleh dari usahanya tanpa mendapatkan bantuan dari pihak lain. Ia mengembangkan kerja dan usaha berdasarkan atas kekuatan dasarnya, entah modal dalam bentuk uang maupun bentuk barang dan jasa. Pedagang juga memiliki modal SDM yang memadai, guna menjamin keberlangsungan usahanya.

b. Modal Luar (eksternal)

Modal luar adalah modal yang diperoleh dari orang lain, berupa uang maupun barang dan jasa. Modal luar dalam ekonomi ialah modal yang didapat dari pihak kedua, misalnya pemerintah atau pihak-pihak terkait. Ada juga modal dari luar yang membutuhkan pengembalian sekaligus

bunga atau laba, misalnya dari koperasi atau simpan pinjam. Modal luar juga berupa dukungan atau motivasi dari pihak luar yang mau membantu saudaranya yang menjalankan usahanya.

3. Pandangan Gereja Tentang Modal dan Kerja

Gereja melihat modal dari dua sudut, yakni modal berupa uang atau barang dan modal berdasarkan SDM. Modal berupa materi merupakan modal dasar yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan usahanya. Sementara modal dalam arti SDM merupakan modal utama seseorang atau kemampuan seseorang dalam menjalankan usahanya berdasar pada pengetahuan atau ilmu yang dimilikinya. Berbicara tentang modal, maka tidak terlepas dari subyek kerja atau orang yang menjalankan usahanya. Bagaimana modal dimiliki tanpa usaha atau kerja, begitu pula sebaliknya, kerja tanpa memiliki modal. Kedua hal ini sulit untuk dipisahkan, karena kerja tanpa modal tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan (LE.§.14 §.282). *Magesterium Sosial Gereja* melihat ungkapan hubungan antara kerja dan modal sebagai sebab akibat dari sebuah usaha, artinya modal tanpa usaha maka menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak memberikan kepuasan dan begitu pula sebaliknya, oleh karena itu bagaimana maksud Gereja untuk menjadikan modal dan kerja sebagai dua unsur yang saling berpengaruh dalam menjalankan usaha.

Kesadaran bahwa “dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu” (1Kor 7:31) bukanlah sebuah dalil untuk tidak terlibat di dalam dunia ini, apalagi membebaskan seseorang dari kerja, kata St. Paulus

“Sebab kamu sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan (2 Tes 3:7;10). Kita diminta oleh St. Paulus untuk menjadikan kerja dengan tangan sendiri sebagai suatu kehormatan agar “tidak bergantung pada siapa pun” (1Tes 4:12), serta memperhatikan suatu solidaritas yang juga diwujudkan dengan berbagi hasil-hasil kerja mereka dengan “orang yang berkekurangan” (Ef 4:28).

Kerja memiliki suatu prioritas intrinsik atas modal, artinya kerja menjadi prioritas utama dalam modal serta keduanya saling terkait. Prinsip ini secara langsung menyangkut proses produksi, dalam proses ini kerja selalu merupakan penyebab utama, sementara modal adalah seluruh perangkat sarana produksi, tetap merupakan instrument atau penyebab instrumental belaka. Prinsip ini merupakan suatu kebenaran kasat mata yang muncul dari keseluruhan pengalaman historis manusia (LE. §.12). Mesti ada relasi yang saling melengkapi antara kerja dan modal. Gereja menegaskan bahwa keduanya saling bergantung “ tidak mungkin ada modal tanpa kerja, mustahil ada kerja tanpa modal” (RN §.11).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN DESKRIPSI DATA

A. Letak Geografis Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang ditentukan oleh penulis adalah pasar Wamanggu Kabupaten Merauke. Pasar ini berada di kelurahan Mandala, distrik Merauke. Letak pasar Wamanggu di pusat kabupaten, kota Merauke dengan memiliki fisik bangunan permanen atau semi mall. Bangunan berlantai 3 (tiga) ini, menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat Merauke dalam hal ekonomi. Dalam penelitian penulis tidak ada data yang jelas terkait luas areal pasar, alasannya bahwa data tersebut masih dipegang oleh konsultan pembangunan pasar. Dengan ini batas-batas wilayah pasar Wamanggu Kabupaten Merauke sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Paulus Nafi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan gang Bintoro
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan TMP (taman makam pahlawan)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Gor (gedung olahraga)

2. Latar Belakang Pembangunan dan Pengolahan Pasar Wamanggu

Kabupaten Merauke

Sesuai dengan Peraturan Presiden no 12 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern, serta mengingat peraturan Bupati Merauke no 8 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar, maka sejalan dengan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan, yang berakibat pada meningkatnya daya jual beli masyarakat terhadap kebutuhan rumah tangga, maka diperlukan adanya pasar yang merupakan salah satu entitas ekonomi strategis. Bahwa untuk mengatur jalannya kegiatan pasar serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terwujudnya fungsi pasar serta memberikan landasan hukum terhadap pengelolaan pasar perlu dilakukan pengaturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Kebutuhan masyarakat akan pentingnya pertumbuhan ekonomi, serta mendorong kemajuan dalam hal kesejahteraan, maka dengan hadirnya pasar Wamanggu dapat membantu menjawab hal tersebut demi kemajuan masyarakat Merauke.

3. Jumlah Pedagang, Pegawai, dan Sarana yang Ada

a. Jumlah Pedagang

Jumlah pedagang yang terdaftar di pasar Wamanggu adalah 1.100 (seribu seratus) pedagang serta memiliki tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, berdasarkan undian untuk memperoleh tempat tersebut (data dari studi dokumen)

b. Jumlah Pegawai dan Staf

Jumlah pegawai dan staf yang ada di pasar Wamanggu untuk pengelolaan pasar berjumlah 26 (dua puluh enam) pegawai dan staf, diantaranya 6 (enam) orang sebagai pegawai dan 20 orang honorer dan dibagi persit atau berkelompok. Sesuai dengan peraturan daerah no 8 tahun 2008 tentang bentuk UPTD dan no 16 tentang organisasi dan tata kerja unit dan teknik dinas (data dari studi dokumen/literatur)

c. Jumlah Tempat

Jumlah tempat fisik yang disediakan adalah 1.139 (seribuh seratus tiga puluh sembilan) tempat dengan rinciannya, 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) kios, dan 200 (dua ratus) pelataran, serta 442 (empat ratus empat puluh dua) los yang disiapkan oleh pemerintah di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke (data dari studi literatur/dokumen)

d. Nama Pasar dan Jenis Tempat

Nama pasar kelas 1 (satu) adalah Pasar Wamanggu berada di jalan Paulus Nafi Merauke (data berdasarkan studi dokumen dan pihak pengelola pasar). Tempat dagangan yang disiapkan sesuai dengan jenis terdiri dari:

- 1) Kios:
 - a) Kios pakaian
 - b) Kios kelontongan dan pecah belah
 - c) Kios perhiasan
 - d) Kios kosmetik
 - e) Kios sepatu dan sandal

- f) Kios elektronik
 - g) Kios sepeda
 - h) Kios/warung
- 2) Los :
- a) Los daging sapi dan rusa
 - b) Los daging babi dan saham
 - c) Los ayam
 - d) Los ikan, udang, cumi dan kepiting
 - e) Los beras
 - f) Los pisang dan ubi-ubian
 - g) Los bumbu dapur
 - h) Los sayuran
- 3) Pelataran disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan tempat. (data dari pihak pengelola pasar Wamanggu, selasa 15 Februari 2016)

B. Latar Belakang Kehidupan Responden

1. Keadaan Ekonomi Responden

Mata pencaharian responden adalah pedagang, dengan keanekaragaman jenis dagangan yang berbeda. Di samping itu, para pedagang dengan usaha dan kerja keras mereka mengolah dagangan guna bertahan hidup. Hal yang menarik adalah, sebagian besar pedagang mengambil pinjaman di koperasi-koperasi atau simpan pinjam dengan waktu 1 (satu) minggu. Jumlah pinjaman berawal dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mereka akan menerima bersih dari pinjaman adalah Rp. 450.000,00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sementara 50.000,00

(lima puluh ribu rupiah) dipotong oleh pihak koperasi untuk administrasi. Bahkan pengembalian lebih besar dari pinjaman yakni sampai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan kata lain 2 (dua) atau 3 (tiga) hari mereka akan menyeter ke pihak koperasi yang telah menunggu di pasar. Pihak koperasi akan mendapatkan laba 5-10 % dari besarnya pinjaman, terhitung mulai dari hari pinjaman dan batas waktu selama 1 (satu) minggu. Para pedagang ini tetap melakukan pinjaman lagi, karena tidak ada modal yang mereka miliki. Dari data yang diperoleh, klasifikasi pedagang pasar Wamanggu berdasarkan jenis jualan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Pedagang	Jumlah
1.	Sayur-mayur, ubi-ubian, sagu, pisang	234 pedagang
2.	Sembako	215 pedagang
3.	Ikan, udang, kepiting	54 pedagang
4.	Daging	85 pedagang
5.	Pakaian	137 pedagang
6.	Sepatu-sandal	42 pedagang
7.	ART (alat rumah tangga)	40 pedagang
8.	Perhiasan dan asesoris	42 pedagang
9.	Elektronik (tv, hp,radio,dll)	25 pedagang
10.	Sepeda	5 pedagang
11.	Warung (kopi, makanan, dll)	16 pedagang
	Total	895 Pedagang

Data: studi literatur atau dokumen di pasar Wamanggu, Selasa 15 Februari 2016

2. Keadaan Sosial Budaya

Pedagang Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke memiliki latar belakang budaya yang beragam atau berbeda, hal ini dapat dilihat dari keberagaman pedagang yang berasal dari suku yang berbeda. Dari data yang diperoleh, para pedagang di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke terdiri dari beberapa suku. Hal ini belum menunjukkan akan adanya sebuah kebersamaan dalam komunitas atau kelompok. Dimana masing-masing pedagang hanya sebatas melihat kekompakan dan kebersamaan, berdasarkan suku tertentu atau kedekatan keluarga. Para pedagang secara umum belum menunjukkan kerjasama dan lebih utama adalah nilai akan solidaritas. Mengapa demikian? Karena mereka belum memahami secara penuh akan perbedaan yang bertujuan untuk saling melengkapi dan mendukung, sehingga tidak jarang sering terjadi keributan kecil antara sesama pedagang karena masalah kecemburuan. Data berdasarkan asal-usul budaya atau suku dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

No.	Suku	Jumlah
1.	Papua	179 pedagang / 20 %
2.	Jawa	313 pedagang / 35 %
3.	Makasar	290 pedagang / 30 %
4.	Padang	80 pedagang / 10 %
5.	Kei	10 pedagang / 2 %
6.	NTT	23 pedagang / 3 %
	Total	895 pedagang / 100%

Data: studi literatur atau dokumen pasar Wamanggu, selasa 15 Februari 2016

3. Keadaan Sosial Relegius

Para pedagang pasar Wamanggu Kabupaten Merauke berasal dari suku yang berbeda, dengan demikian mereka juga berbeda dalam iman dan keyakinan . Hal yang menarik sesuai dengan pengamatan dan penelitian penulis adalah, ketika hari jumat maupun hari yang lain misalnya pada jam 12.00 WIT para pedagang yang muslim akan menunaikan ibadah sholat jumat, bahkan sebagian pedagang menutup kios atau beristirahat sejenak untuk berdoa di mushola yang berada di areal pasar, ada juga yang memanggil keluarga untuk menjaga kios selama mereka berdoa atau sholat.

Sementara yang Kristen, pada hari Minggu mereka mengikuti ibadah atau Misa sebelum mereka berdagang. Ada juga yang pada hari Minggu beristirahat dari aktivitas yang sering dilakukannya, sementara ada yang akan mengikuti kebaktian pada sore hari, dengan kata lain pada pagi hari mereka berdagang terlebih dahulu. Berdasarkan data yang diperoleh tentang keyakinan pedagang pasar Wamanggu, dapat dilakrifikasi sesuai dengan tabel berikut:

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	448 pedagang / 50 %
2.	Katolik	268 pedagang / 30 %
3.	Protestan	179 pedagang / 20 %
	Total	895 pedagang / 100%

Data: studi literatur atau dokumen di pasar Wamanggu, selasa 15 Februari 2016.

C. Regulasi dan Aktivitas Pasar Wamanggu

1. Regulasi Pasar Wamanggu

Pasar Wamanggu kabupaten Merauke memiliki regulasi atau peraturan sesuai dengan peraturan Bupati Merauke no 8 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar. Semua peraturan termuat dalam XIII BAB dengan butir-butir peraturan sebagai berikut:

- a. BAB I berbicara tentang ketentuan umum pasar di dalamnya dikutip nama daerah, segi pemerintahan, bupati, peraturan, dinas yang mengelola, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelola Pasar (UPTDPP), retribusi pelayanan, kawasan pasar, kios, los, pelataran, dan pedagang.
- b. BAB II berbicara tentang pengelolaan kawasan pasar meliputi: kebersihan dan keindahan, ketertiban dan keamanan, tempat berdagang, parkir, tempat bongkar muat, tempat promosi, pengelolaan retribusi, pembinaan atau pemberdayaan pedagang, dan batas-batas kawasan pasar.
- c. BAB III berbicara tentang tata tertib pasar (untuk tata tertib pasar akan dilampirkan).
- d. BAB IV berbicara tentang: nama pasar, kelas pedagang, dan jenis dagangan, yang telah dibahas pada halaman 50-51.
- e. BAB V berbicara tentang tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang, yakni melalui surat permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai 6000, foto copy KTP yang telah dilegalisir, foto copy kartu keluarga, dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.

- f. BAB IV berbicara tentang tata naskah, bentuk, dan ukuran yang meliputi: KIP dan KBP (kartu identitas pedagang dan kartu bukti pedagang).
- g. BAB VII mengenai masa berlaku KIP dan KBP (kartu identitas pedagang dan kartu bukti pedagang).
- h. BAB VIII mengenai tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP.
- i. BAB IX mengenai penetapan lokasi pelataran di dalam pasar dan kawasan pasar.
- j. BAB X mengenai tatacara pencabutan hak penggunaan kios, los atau pelataran.
- k. BAB XI mengenai penetapan zonasi dan jam buka aktivitas pasar.
- l. BAB XII mengenai tatacara dan syarat-syarat administrasi penyerahan kembali hak penggunaan kios, los atau pelataran.
- m. BAB XIII ketentuan penutup.

Data: studi literatur atau dokumen di pasar Wamanggu, selasa 15 Februari 2016.

2. Aktivitas di Pasar Wamanggu

Dalam peraturan bupati Merauke no 8 tahun 2013 yang termuat pada bab xi (sebelas) poin a yang berbunyi pasar Wamanggu buka pukul 06.00 WIT dan ditutup pukul 18.00 WIT. Namun realita di lapangan aktivitas dimulai dari pukul 02.00-18.00 WIT. Dimana sistem aktivitas yang ada di pasar Wamanggu dalam penawaran barang dan jasa dibagi dalam 2 (dua) sesi. Sesi yang pertama terjadi pada pukul 02.00-05.00 WIT. Pada sesi pertama ini, proses jual beli antara pedagang yang berasal dari lokasi dengan pedagang yang berjualan di dalam pasar.

Pedagang dari lokasi menjual barang dagangannya kepada pedagang yang di dalam pasar dengan harga yang sedikit murah misalnya, 3 (tiga) ikat kangkung Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). Dengan demikian, pedagang yang berada di dalam pasar membeli jualan pedagang dari lokasi kemudian menjual kembali pada pkl 06.00-18.00 WIT. Otomatis harga barang sedikit mahal dibanding harga pertama, karena di situlah letak keuntungan pedagang pasar Wamanggu.

Baik pedagang yang dari lokasi, maupun pedagang pasar Wamanggu melakukan aktivitas dagang sejak pkl 02.00 WIT. Sesi yang kedua ini dimulai dari pkl 06.00-18.00 WIT oleh pedagang pasar Wamanggu. Pada siang hari, situasi pasar akan sunyi sehingga sebagian pedagang akan mempersiapkan jualan yang tersisa untuk dijual di luar areal pasar yakni samping jalan raya, namun ada juga pedagang yang akan melanjutkan aktivitas berdagang di pasar Mopah alasannya karena sore hari pasar Mopah ramai oleh pembeli.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN INTERPRETASI DATA

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja

Pada poin ini penulis menggunakan kajian teori tentang solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum pada BAB II sebagai pedoman. Kemudian penulis memasukkan hasil penelitian dari lapangan. Setelah itu penulis akan mencoba mengola atau menghubungkan teori dengan kenyataan di lapangan. Penulis membahas makna solidaritas berdasarkan penelitian penulis dengan menggunakan teknik wawancara.

1. Uraian Teori

a. Prinsip Solidaritas

Dalam *ensiklik Sollicitude Rei Socialis, Laborem Exercens* dan *Centesimus Annus*, Paus Yohanes Paulus II menyebut solidaritas sebagai keutamaan hakiki bagi kehidupan sosial. Dimana “solidaritas” bukan perasaan belas kasihan yang tidak jelas atau kesedihan yang dangkal dengan kemalangan begitu banyak orang. Sebaliknya, solidaritas adalah ketetapan hati yang mantap dan tekun untuk mengkomitment-kan diri pada kesejahteraan umum, yaitu pada kebaikan semua orang dan setiap individu.

Solidaritas dilihat dari pengertiannya adalah sebuah sikap yang menunjukkan rasa mempunyai atau kebersamaan dalam kelompok atau organisasi tertentu, namun tidak hanya sebatas rasa bersedih atau belas

kasihan karena penderitaan seseorang atau bantuan karena kedekatan dan keakraban. Solidaritas adalah sebuah sikap yang berasal dari hati, untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain dan bukan karena kita menunjukkan kebolehan atau kekuatan kita, akan tetapi solidaritas menjadi sebuah ketetapan hati untuk mau memberikan diri kepada orang lain demi tujuan semua orang dan bukan diri sendiri, tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Solidaritas sebagai sebuah prinsip sosial menjamin kemandirian seseorang dan bukan perasaan belas kasihan yang mengarahkan manusia menuju ketergantungan abadi.

b. Prinsip Subsidiaritas

Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian dari orang lain maupun pihak-pihak terkait. Subsidiaritas merupakan pemberian bantuan kepada seseorang baik moril maupun materil yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut agar berusaha menjalankan aktivitas dan kerjanya.

Berdasarkan prinsip ini, semua lembaga dari satu tatanan lebih tinggi mesti menerapkan perilaku menolong (*subsidium*), karenanya mendukung, memajukan, mengembangkan terhadap satuan-satuan sosial perantara dapat secara tepat melaksanakan fungsi-fungsi yang diembankan kepadanya tanpa dipaksa untuk mengalihkannya atau memberikan secara tidak adil kepada satuan-satuan sosial lain dari tatanan lebih tinggi, yang menyebabkan satuan-satuan sosial perantara tadi akan terpuruk karena diserap dan digantikan,

sehingga pada akhirnya menyaksikan bagaimana martabat serta tempat mereka yang secara hakiki diingkari.

Subsidiaritas, yang dipahami dalam arti positif sebagai bantuan ekonomi, kelembagaan atau hukum yang ditawarkan kepada satuan-satuan sosial dari tatanan lebih rendah, mencakup rangkaian implikasi negatif bersepadanan yang menentukan negara untuk tidak melakukan apa pun juga yang nyata-nyata membatasi ruang keberadaan dari sel-sel hakiki yang lebih kecil dari masyarakat. Prakarsa, kebebasan serta tanggung jawab sel-sel tersebut mesti tidak boleh digantikan.

c. Prinsip Kesejahteraan Umum

Prinsip kesejahteraan umum, padanya setiap segi kehidupan sosial mesti dikaitkan agar ia dapat menggapai maknanya yang paling penuh, berasal dari martabat, kesatuan serta kesetaraan semua orang. Berdasarkan artinya yang utama dan luas diterima. Kesejahteraan umum merujuk pada “keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri.

Kesejahteraan umum karenanya mencakup semua anggota masyarakat, tak ada satu pun yang dikecualikan dari kerja sama, seturut kemampuannya masing-masing orang, dalam menggapai dan mengembangkannya. Setiap orang juga berhak untuk menikmati kondisi-kondisi kehidupan sosial yang dihasilkan oleh pencarian akan kesejahteraan umum. Ajaran Paus Pius XI masih tetap relevan: “Pemerataan harta benda tercipta yang, seperti tiap orang

bernalarnya, dewasa ini mengalami situasi yang buruk sekali akibat perbedaan amat besar antara kelompok kecil yang kaya raya dan mereka yang serba tak empunya dan tak terbilang jumlahnya, harus dikembalikan pada kesesuaian dengan norma-norma kesejahteraan umum, yakni keadilan sosial (bdk. Yohanes XXIII, *Ensiklik Mater et Magistra*.§.46)

Semua orang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pribadi adalah subyek utama untuk menjalankan tugas tersebut demi tujuan bersama. Kesejahteraan umum telah diatur di dalam setiap negara sebagai bentuk lahiriah dari masyarakat. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya, sehingga kesempurnaan kesejahteraan bersama akan berada dalam diri Allah sendiri, yang telah melengkapi hidup manusia dengan menebus dosa manusia dalam diri Putera-Nya sebagai kepenuhan akan janji untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kemiskinan.

2. Pembahasan Hasil Wawancara

a. Prinsip Solidaritas

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke tentang prinsip solidaritas bagi para pedagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedagang di pasar Wamanggu berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri, bila kebersamaan hanya berdasarkan segi kekeluargaan semata. Nilai solidaritas yang sebenarnya tidak berdasarkan pada unsur apapun, baik kekeluargaan maupun kedekatan seseorang tidak diimplementasikan secara baik di pasar Wamanggu.

“Di sini kita satu bantu satu, tapi tidak semua, hanya kami yang dekat saja. Misalnya, bantu jaga barang waktu teman tidak ada, kalau bantu uang, kayanya berat, karena kami semua pinjam” (Ibu R wawancara, senin 15 Februari 2016. Pkl 09.16 WIT).

Yang kedua, berkaitan dengan toleransi di antara para pedagang yang menyentuh pada nilai solidaritas yakni ikut merasakan penderitaan sesama dan bukan mementingkan diri sendiri. Pada poin ini, sesuai dengan kenyataan di lapangan, dimana sebagian pedagang yang berjualan di luar tempat yang tidak semestinya mereka berada. Bagi para pedagang yang berada di dalam areal pasar, mereka berharap agar semua berjualan di dalam pasar, alasannya karena di dalam ruangan masih banyak tempat yang kosong. Kemudian ketika mereka bertahan di luar, otomatis pengunjung atau pembeli tidak masuk ke dalam pasar, karena pengunjung sudah mendapatkan barang yang dicari. Dengan demikian, jualan para pedagang yang berada di dalam ruangan tidak dibeli oleh para pengunjung atau pembeli.

“Saya mau, teman-teman yang ada di luar harus masuk jualan di dalam, karena mereka di luar nanti orang tidak mau masuk di dalam. Sementara pasar ini dua, jadi banyak orang lebih pilih ke pasar di Mopah dibanding di sini. Kami mau, kalau bisa pedagang di satu tempat saja mau dapat atau tidak kita semua di satu tempat, kemudian

pedagang yang duduk di luar harus masuk di dalam. Pedagang yang di luar kebanyakan dari lokasi, jadi dorang jualan dari subuh sampai siang baru dorang pulang” (Ibu S wawancara, Selasa 16 Februari 2016. Pkl 09.39 WIT).

Yang ketiga, terkait dengan pemerataan harga barang. Pada poin sedikit menarik untuk dibahas, alasannya karena harga barang misalnya tentang sayur-mayur, memiliki harga yang berbeda. Di sini tergantung asal pedagang sendiri, sebab ada sebagian pedagang yang dari lokasi sejak pkl. 02.00 WIT, tetap berjualan sampai siang hari. Dengan keadaan ini, memberikan nilai yang kurang baik bagi kebersamaan pedagang. Alasannya karena, pedagang dari lokasi telah melakukan transaksi jual beli sejak pkl. 02.00 WIT kepada para pedagang yang berada di dalam areal pasar atau pedagang yang memperoleh tempat berdagang. Akan tetapi jumlah barang yang mereka bawa cukup banyak, maka mereka bertahan sampai siang hari. Dengan demikian segala cara akan mereka lakukan agar jualan mereka cepat habis dibeli, bahkan dengan harga yang murah. Ketika mereka menjual barang dengan harga yang murah, maka pedagang yang di dalam akan bersungut, karena jualan mereka tidak ada yang beli. Semua orang akan mencari harga yang murah ditambah dengan kualitas barang yang sama, sebab berasal dari satu tempat yang sama pula, yakni dari pedagang lokasi sendiri.

“Di sini kami kurang bekerja sama, hanya teman dekat saja, apalagi mace-mace dari lokasi yang jualan di sini bawa barang banyak kemudian, obral semua di bawah pelataran begitu dengan harga yang rendah, pasti semua orang beli di situ. Iya mereka jual kangkung kalau 3 (tiga) ikat Rp. 5000,00 (lima ribuan rupiah), maka kami punya 2 (dua) ikat Rp. (lima ribuan rupiah) pasti tidak laku. Ya saya mengharapkan kalau bisa semua pedagang jualan di dalam saja, tempat juga masih kosong, kalau pelataran ya ukur sesuai dengan meja saja. Jangan kita punya ukuran meja kecil, mereka pakai pelataran besar dengan jumlah barang yang banyak, makanya hampir setiap hari saya marah-marah mereka terus” (Ibu A wawancara, Kamis 18 Februari. Pkl 11.10 WIT).

Yang keempat berkaitan dengan penggunaan tempat yakni pelataran. Selain meja yang digunakan oleh sebagian pedagang, ada juga pedagang yang menggunakan pelataran. Bagi para pedagang yang menggunakan meja atau tempat yang disediakan oleh pemerintah, mereka berharap pihak pengelola pasar mengukur pelataran sesuai dengan ukuran meja. Alasannya adalah semua harus merasakan hal yang sama, jika meja kecil maka pelataran juga kecil agar pedagang mengoptimalkan tempat secara efisien dan bukan mengobral barang dengan jumlah yang berlebihan. Sering terjadi keributan juga dari permasalahan efisien dalam menggunakan tempat.

“Apalagi kami yang pakai tempat ini sudah bayar mahal, orang di pasar Mopah santai saja. Pendapatan hanya untuk bayar beras dan urus makan saja. Bagaimana mau dapat keuntungan jika di Merauke ada dua pasar? Sementara pengunjung banyak lebih senang belanja pakaian di pasar Mopah” (Bpk N wawancara, senin 29 Februari 2016. Pkl 08.00 WIT).

Yang kelima adalah masalah jumlah pasar. Pada poin ini, hampir semua pedagang mengatakan hal yang sama. Bagi mereka, pasar di Mopah alangkah bagusnya ditutup saja. Alasannya karena, mengingat jumlah pembeli di Merauke tidak banyak. Kemudian distribusi pasar yang ketat dan distribusi pasar yang biasa. Pedagang pasar Wamanggu terikat dengan peraturan, sementara pedagang di pasar Mopa memiliki kebebasan. Bagi mereka, pengunjung atau pembeli lebih senang ke pasar Mopah dibanding pasar Wamanggu, alasannya karena pasar Mopa bebas, baik parkir maupun peraturan lainnya. Hal-hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi para pedagang pasar Wamanggu terlebih kepada pedagang yang setiap bulan membayar tempat atau ruko dan kios sebesar Rp. 460.000,00-500.000,00 (empat ratus enam puluh sampai lima ratus ribu rupiah perbulan) bahkan ada yang membayar tempat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun. Mereka membayar mahal tetapi jumlah pengunjung sedikit, apalagi masyarakat Merauke lebih senang berbelanja pakaian dan peralatan lainnya di pasar Mopah.

b. Prinsip Subsidiaritas

Berkaitan dengan poin kedua yakni prinsip subsidiaritas. Untuk poin ini belum terlihat penerapannya, baik dari para pedagang sendiri maupun pihak terkait. Baik nilai materil maupun moril, yang menjadi modal utama seorang pedagang.

“Saya jualan kalau ada barang, kalau tidak ada saya istirahat. Jadi jualan sampai jam 5 (lima) sore -7(tujuh) malam baru saya pulang. Saya orang Papua, hanya jualan untuk makan saja, tidak perlu beli-beli barang berharga, karena pendapatan hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu hari. Memang saya mau hidup sejahtera tapi mau ke sana itu susah” (Ibu K wawancara, Selasa 16 Februari 2016. Pkl 09.39 WIT).

Yang pertama, terkait prinsip subsidiaritas adalah pemberian bantuan yakni bantuan berupa sosialisasi tentang berdagang. Seorang pedagang harus menyadari profesinya sebagai pedagang dan bukan mengisi kekosongan atau adanya barang dagangan (musiman). Penulis menekankan poin ini, terkait permasalahan di lapangan, dimana sebagian pedagang (asli) melakukan aktivitas keseharian sebagai seorang pedagang hanya berlandaskan pada adanya barang. Ketika barang tidak ada, maka dia beristirahat. Kemudian mereka kurang dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mengatur dagangan, bagaimana mengelola dagangan, bagaimana menyajikan barang, demi tujuan yaitu pendapatan yang menjadi hasil dari berdagang, sehingga secara garis besar

mereka kalah saing dari pedagang pendatang. Tidak menutup kemungkinan, jika berjualan selama puluhan tahun kurang memberikan perubahan pada nilai ekonomi maupun kesejahteraan pedagang sendiri.

“Saya jualan dengan modal dari pinjaman koperasi, mulai dari 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terima bersih dari pinjaman 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong koperasi, saya bayar ke koperasi malah lebih, bahkan sampai 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bantuan pernah ada dari pemerintah, tapi hanya untuk orang-orang tertentu yang punya keluarga ada di dalam. Dulu waktu Bpk. Jhon kami masih dapat bantuan, tapi sekarang sudah tidak. Kami selalu disuruh kumpul KTP untuk bantuan, dan isi formulir, tetapi tidak pernah dapat bantuan. Harapan saya kalau bisa ada sosialisasi bagi kami mama-mama papua untuk jualan, bagaimana mengatur jualan yang baik, kalau untuk bantuan modal dari pemerintah, kayanya saya sudah tidak berharap lagi. Saya dan teman-teman jualan ini hanya untuk koperasi, tapi mau bagaimana? Mereka juga selama ini sudah banyak membantu kami. Kalau bukan dorang, siapa lagi yang mau bantu kami” (Ibu K wawancara, selasa 16 Februari 2016. Pkl 09.39 WIT).

Yang kedua, terkait masalah bantuan berupa modal (uang). Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II yakni ilmu ekonomi melihat modal (uang) sebagai kaki dalam usaha, baik modal internal maupun eksternal. Pedagang di pasar Wamanggu terlebih khusus pedagang Papua tidak memiliki modal (uang) sendiri, mereka juga tidak mendapatkan bantuan modal (uang) dari pemerintah. Para pedagang ini memperoleh modal dari pinjaman, baik di koperasi maupun di BRI, dengan bunga yang lumayan besar. Bahkan besar pinjaman tidak secara utuh diterima karena ada pemotongan untuk administrasi pinjaman. Hal ini sangat menyulitkan mereka untuk berupaya mandiri dan bebas, sebab mereka selalu terikat dengan pinjaman.

c. Prinsip Kesejahteraan Umum

Sesuai dengan nama prinsip ini ialah kesejahteraan umum, maka telah dijelaskan dalam dokumen-dokumen Gereja, bahwa komunitas atau kelompok mementingkan kesejahteraan bersama dibanding kesejahteraan pribadi. Di dalam kesejahteraan kelompok atau komunitas, maka akan ditemukan kesejahteraan individu dan bukan sebaliknya.

“Satu hari saya bisa dapat Rp. 500.000,00-700.000,00 (lima ratus sampai tujuh ratus ribu rupiah). Kalau hari jumat siang jam 12 kios saya tutup karena sholat, selesai sholat baru saya buka lagi. Untuk hasil, hanya tabung dan urus sekolah anak dan makan minum setiap hari. Kalau pengunjung banyak bisa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu hari, kalau sepi ya Rp. 500.000,00-700.000,00 (lima ratus

sampai tujuh ratus ribu rupiah)” (Ibu S wawancara, senin 29 Februari 2016. Pkl, 10.00 WIT).

Namun realita di pasar Wamanggu malah sebaliknya. Para pedagang mementingkan dirinya sendiri dari pada kesatuan pedagang. Mereka berlomba-lomba mencari kekayaan harta benda masing-masing dan mengabaikan kesejahteraan bersama (umum). Yang dimaksud di sini, adalah bagaimana kesuksesan dalam komunitas secara bersama-sama dan bukan perorangan. Bagaimana caranya, yang kuat (bermodal) membantu yang lemah (tidak ada modal) dan yang lemah (tidak ada modal) belajar dari yang kuat (bermodal).

“Pendapatan satu hari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau pengunjung sepi, mungkin Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Pendapatan ini hanya untuk bayar koperasi, sisanya untuk makan sehari-hari dan urus anak sekolah. Karena pengunjung juga tidak banyak, kemudian kami punya modal juga pas-pasan ya, kerja hanya untuk bayar koperasi” (Ibu K wawancara senin, 22 Februari 2016. Pkl, 09.28 WIT).

Kesejahteraan juga dilihat berdasarkan jumlah atau besar pendapatan seorang pedagang perhari. Untuk ukuran pedagang Papua, pendapatan mereka dibawah rata-rata, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka bosan dengan suasana yang ada. Mereka ingin berhenti, tetapi mereka tidak memiliki

ketrampilan untuk hal yang lain. Mereka mencoba bertahan, tetapi sulit untuk melewati.

“Saya tinggal di natuna, kalau ada taxi saya naik, kalau tidak jalan kaki saja. Jam 04 saya sudah dari rumah ke pasar” (Ibu K wawancara, Selasa 16 Februari 2016. Pkl 09.39 WIT).

Untuk permasalahan kesejahteraan secara umum, terkait dengan keamanan pasar, kebersihan sudah terlihat. Sementara untuk harta benda, masih berada di bawah standar, sebab sebagian telah mencapai hasil yang maksimal, sedangkan sebagian pedagang masih berada di bawah garis kesejahteraan. Bahkan bisa dikatakan, hampir 90 % pedagang asli Papua belum sejahtera dalam ukuran harta benda yang diperoleh dari hasil dagangan selama puluhan tahun lamanya. Ukuran yang dipakai penulis untuk mengetahui atau menemukan kesejahteraan (harta benda) bagi pedagang Papua, dari tingkat sarana prasarana yang digunakan, baik dari transportasi datang ke pasar dan pulang dari pasar. Semua responden yang diwawancara oleh penulis terkait sarana transportasi, dengan satu bahasa mereka katakan, bahwa mereka ke sini dengan transportasi umum (taxi, mobil pedesaan), dengan selang waktu berdagang yang sudah lama. Semestinya seorang pedagang yang berjualan selama puluhan tahun, dia sudah berusaha untuk memperoleh transportasi sendiri, baik sepeda motor bahkan sampai mobil.

Dengan demikian tidak dapat dihindari, jika terjadi keributan antar pedagang bahkan kecemburuan sering terjadi antar pedagang yang berbeda suku. Alasannya apa? Alasannya adalah segi kecemburuan, pedagang Papua merasa bahwa mereka kalah saing, mereka kalah modal, mereka kalah harta. Dengan demikian, rasa memiliki tanah ini akan muncul. Mereka merasa pedagang dari luar telah mengambil bagian mereka, pedagang dari luar telah memonopoli ruang gerak mereka, maka pentingnya kesadaran dari semua pihak akan hal ini, agar tidak terjadi keributan di kemudian hari.

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Prinsip-prinsip Umum Ajaran Sosial Gereja di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke

1. Faktor-faktor Pendukung

a. Prinsip Solidaritas

Faktor-faktor pendukung implementasi ajaran sosial Gereja yakni prinsip solidaritas adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Bupati No 8 tahun 2013

Dengan kehadiran pasar secara fisik dapat menampung para pedagang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Dalam Peraturan Bupati no 8 tahun 2013, kehadiran pasar ini mengantar para pedagang untuk memupuk nilai solidaritas, nilai kebersamaan, saling berbagi, saling melengkapi. BAB III tentang tata tertib pasar pada poin d. dimana “dilarang melakukan aktivitas

jual beli di luar jam buka”. Pada bab v (lima) tentang “tatacara dan syarat-syarat menjadi seorang pedagang”, tidak hanya bagi orang khusus, tetapi terbuka secara umum. Dengan demikian peraturan Bupati ini menjadi jelas dalam mendukung prinsip solidaritas, dengan menyiapkan fisik pasar sebagai obyek utama sekaligus tempat bagi para pedagang untuk berkumpul. Hal yang sama juga tertera pada peraturan Bupati no 8 tahun 2013 bab v (lima) yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengambil bagian dalam usaha berdagang, dengan mengisi formulir dan mengikuti semua peraturan. Semua pedagang tidak ada yang diistimewakan, sebab semua sama dalam peraturan.

2) Budaya

Budaya menjadi salah satu faktor dalam mendukung penerapan prinsip solidaritas. Pedagang yang berasal dari luar, semestinya belajar tentang budaya yang ada di daerah ini. Proses inisiasi sangat penting dalam sebuah komunitas. Hal ini menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk masuk dalam kebersamaan dengan orang lain. Melihat nilai solidaritas yakni penerapannya pada pasar Wamanggu hanya sebatas budaya dan kedekatan seseorang dengan orang lain. Proses interaksi dan komunikasi antar pedagang dengan berlatar belakang budaya yang sama kemudian akan menyeluruh bagi semua pedagang.

“Saya dan teman-teman saling bantu karena kami sama-sama dari Mopah baru” (Ibu K, 22/2/2016).

3) Bahasa

Bahasa menjadi salah satu faktor utama dalam sebuah komunitas sekaligus pemersatu dalam komunitas tersebut. Dengan bahasa para pedagang melakukan dialog atau komunikasi timbal balik. Dengan bahasa para pedagang bersatu dalam aktivitas dagang, walaupun berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Para pedagang pasar Wamunggu secara umum menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik antar pedagang maupun pedagang dan pembeli. Tidak menutup kemungkinan juga, bila sebagian pedagang berasal dari daerah yang sama, maka komunikasi juga dengan menggunakan bahasa setempat. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan nilai solidaritas yang dimulai dari suku tertentu kemudian meluas bagi keseluruhan pedagang.

b. Prinsip Subsidiaritas

1) Peraturan Bupati no 8 tahun 2013

Dalam peraturan Bupati Merauke no 8 tahun 2013, juga mendukung nilai subsidiaritas, yakni pembinaan atau pemberdayaan pedagang pasar dan komunitas (bab II. Poin e). Melalui peraturan Bupati ini, “para pedagang memiliki hak yang penuh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana membantu pedagang dalam hal perencanaan dan pengolahan barang dagangan”. Peraturan ini juga membuka kesempatan kepada semua pihak yang mau membantu para pedagang dalam hal pengetahuan berdagang. Serta peraturan Bupati lainnya yang bertujuan untuk menerapkan subsidiaritas

(kesempatan) bagi pedagang pemula untuk menjadi seorang pedagang, dengan mengikuti peraturan dan tata tertib pasar yang telah ditetapkan.

2) Sistem Ekonomi (pinjaman BRI dan Koperasi)

“ Modal diperoleh dari pinjaman koperasi simpan pinjam (koperasi kaswari) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saya terima bersih RP. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi bayar lunas bahkan sampai lebih karena bunga. Jika kita tidak pinjam, siapa yang mau kasih? Kalau hari terakhir dan belum bayar maka kita ambil lagi nanti dipotong dengan sisa yang belum dibayar. Kalau pihak koperasi datang tagih, ya belum ada berarti kita kasih tau belum. Jadi kita tidak mau pinjam, ya mau dapat dimana? Mau dan tidak mau harus mau”
(Ibu S wawancara, selasa 16 Februari 2016. Pkl 09.00 WIT).

Faktor yang mendukung hal ini juga, di antaranya pemberian pinjaman modal usaha. Hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah hal modal (uang). Seperti yang dijelaskan, bahwa uang adalah kaki dalam usaha, tanpa uang sebuah usaha tidak akan berjalan dengan baik. Faktor ini juga telah mendukung para pedagang yang berada di pasar Wamunggu Merauke. Walaupun nilai pinjaman kecil, namun telah membantu sebagian pedagang untuk mengolah barang dagangannya. Mengingat sistem ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan, yang berarti rakyat adalah tujuan utama dari perkembangan ekonomi tersebut. Dengan demikian, lembaga atau pihak-pihak terkait, baik swasta maupun pemerintah memiliki tanggungjawab untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal usaha.

c. Prinsip Kesejahteraan Umum

Faktor-faktor pendukung prinsip kesejahteraan umum, adalah:

1) Kebersihan Lingkungan Pasar

Salah satu faktor pendukung kesejahteraan umum di pasar Wamanggu adalah kebersihan lingkungan atau areal pasar. Dengan kebersihan, maka para pedagang dan pembeli akan merasa nyaman dalam melakukan aktivitas jual beli.

2) Keamanan Pasar

Salah satu faktor utama dalam kesejahteraan umum adalah faktor keamanan. Keamanan merupakan faktor pendukung dalam menerapkan prinsip kesejahteraan umum. Tempat-tempat umum membutuhkan keamanan guna kelancaran dalam aktivitas. Begitu juga dengan pasar sebagai tempat umum yang menampung para pedagang dan pengunjung atau pembeli dari latar belakang yang berbeda. Para pedagang akan bekerja dengan tenang, pembeli akan senang berbelanja bila keamanan selalu terjaga dengan baik. Di pasar Wamanggu untuk masalah keamanan sangat diperhatikan, sebab pihak pasar telah mempersiapkan security untuk menangani masalah keamanan, baik dari dalam maupun luar pasar.

2. Faktor-Faktor Penghambat

a. Prinsip Solidaritas

1) Kurangnya Sikap Toleransi antar Pedagang

“Saya sudah lima tahun jualan di sini, saya tidak masuk ke dalam karena tidak mendapat tempat. Barang-barang yang saya punya banyak, apalagi tempatnya kecil” (Ibu Y wawancara, Kamis 03 Maret 2016).

Kurangnya sikap toleransi menjadi satu faktor yang menghambat prinsip solidaritas di pasar Wamanggu. Hal ini dilihat dari komunikasi dan sikap antar pedagang yang kurang mencerminkan sikap toleransi sebagai cara untuk mempererat persatuan dalam sebuah komunitas dagang. Toleransi bisa dilihat juga dari aktivitas jual beli baik harga barang yang berbeda, maupun kebersamaan dalam penggunaan tempat.

2) Kurangnya Penghargaan Terhadap Kemajemukan

“ Ya kami sejejer ini keluarga semua, sehingga saling bantu. Ibu-ibu yang dari lokasi ini, sudah jualan dari pagi, coba dorang pulang, eh malah tetap sampai siang. Ya kami dapat tempat di dalam, pengunjung banyak dan tidak, sudah resiko tetapi mereka yang di luar itu enak karena pembeli datang langsung ketemu, kemudian dorang punya jualan juga murah” (Ibu V wawancara Senin, 22 Februari 2016. Pkl, 07.30 WIT).

Kemajemukan menjadi nilai positif dalam kebersamaan, baik di masyarakat maupun komunitas-komunitas atau kelompok yang ada. Perbedaan sebenarnya adalah satu faktor yang mendorong seseorang untuk belajar dari sesamanya, namun untuk sebagian pedagang di pasar Wamanggu sedikit berbeda dalam menanggapi masalah kemajemukan ini. Mereka melihat kemajemukan sebagai sebuah senjata yang melawan diri mereka, oleh karena itu ada yang pernah berkata “ lebih baik pemerintah membuat sebuah pasar milik suku tertentu saja”. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kurangnya penghargaan dalam faktor kemajemukan. Sebab sebagian pedagang belum bisa menerima orang lain untuk masuk dalam komunitas tertentu. Hal ini lambat laun akan menjadi polemik dalam kebersamaan seseorang di tengah masyarakat umum.

b. Prinsip Subsidiaritas

1) Kurangnya Pengetahuan Tentang Berdagang

“Saya tidak pernah ikut sosialisasi atau penyuluhan untuk berdagang atau jualan” (Ibu R wawancara, senin 15 Februari 2016. Pkl 09.16 WIT).

Salah satu faktor penghambat dalam prinsip subsidiaritas adalah faktor pengetahuan. Pengetahuan menjadi modal dasar seseorang untuk bagaimana mengatur usaha dan kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pengetahuan bisa dimiliki oleh seorang sejak mengikuti pendidikan formal maupun non formal serta informal.

“Belum lagi saya ambil kredit di koperasi, yang setiap hari hampir di tagih. Ditambah lagi dengan jualan yang tidak bertahan, maka tiap bulan nombok terus. Saya tidak pernah ikut sosialisasi tentang berdagang” (Ibu A wawancara, Kamis 18 Februari. Pkl 11.10 WIT).

Dengan demikian secara umum pengetahuan seseorang bisa didapat dari seminar, sosialisasi, maupun pengetahuan dari buku dan pengalaman hidup. Melihat penerapan prinsip subsidiaritas ini di pasar Wamanggu kurang berjalan, sebab minimnya pengetahuan sebagian pedagang dalam mengelola usaha dagangannya. Diperlukan bantuan dari pihak terkait untuk mau membagi pengetahuan kepada para pedagang, sehingga menjadi modal dalam melakukan aktivitas jual beli.

“Harapan saya kalau bisa ada sosialisasi bagi kami mama-mama Papua untuk jualan, bagaimana mengatur jualan yang baik, kalau untuk bantuan modal dari pemerintah, kayaknya saya sudah tidak berharap lagi” (Ibu K wawancara, Selasa 16 Februari 2016. Pkl 09.39 WIT).

2) Kurangnya Bantuan Modal Usaha

“Semua dari modal saja, kalau ada modal berarti hasil baik karena modal bisa diputar dengan baik” (Ibu S wawancara, Selasa 16 Februari 2016. Pkl 09.00 WIT).

Selain faktor pengetahuan, ada juga faktor bantuan modal (uang) usaha kepada pedagang untuk membantu menjalankan usahanya.

Permasalahan modal (uang) ini, menjadi salah satu faktor penghambat prinsip subsidiaritas. Para pedagang di pasar Wamanggu, terlebih khusus pedagang lokal kurang disentuh oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam hal bantuan modal usaha. Mereka merasa kesulitan dalam mengelola jualan atau dagangan karena faktor modal ini. Mereka berharap pihak pemerintah atau pihak terkait dapat memabantu meringankan beban mereka.

c. Prinsip Kesejahteraan Umum

1) Kurangnya Kerja Sama antar Pedagang

“ Di sini kami kurang bekerja sama, hanya teman dekat saja, apalagi mace-mace dari lokasi yang jualan di sini bawa barang banyak kemudian, obral semua di bawah pelataran begitu dengan harga yang murah, pasti semua orang beli di situ. Iya mereka jual kangkung kalau 3 (tiga) ikat Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah), maka kami punya 2 (dua) ikat Rp. (lima ribu rupiah) pasti tidak laku. Ya saya mengharapkan kalau bisa semua pedagang jualan di dalam saja, tempat juga masih kosong, kalau pelataran ya ukur sesuai dengan meja saja. Jangan kita punya ukuran meja kecil, mereka pakai pelataran besar dengan jumlah barang yang banyak, makannya hampir setiap hari saya marah-marah mereka terus” (Ibu A wawancara, Kamis 18 Februari 2016. Pkl 11.10 WIT).

Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa untuk mencapai kesejahteraan umum diperlukan kerja sama dari semua pedagang. Para pedagang harus

mementingkan kepentingan umum melebihi kepentingan pribadi. Namun para pedagang yang berada di pasar Wamanggu, kurang membangun kerja sama yang baik. Baik dari segi pengetahuan, yakni saling berbagi maupun segi spirit dan motivasi guna membangun kesejahteraan bersama. Kerja sama juga membutuhkan keiklasan serta semangat dalam diri pedagang dan bukan karena terpaksa atau menuntut imbalan jasa.

“Pedagang di pasar ini, kurang bekerja sama, karena masing-masing hanya mengurus barang-barangnya saja. Sebab kami hampir semua ambil kredit atau pinjaman di koperasi” (Ibu O wawancara Rabu, 23 Februari 2016. Pkl, 11.18 WIT).

2) Kurangnya Semangat Usaha dan Kerja Keras Pedagang

“Kalau sepi ya, kita tidur-tidur saja. Jualan-jualan nanti sore bawa ke luar lagi, karena di dalam sudah sepi. Di pasar ini ramai mulai dari subuh tadi, kalau siang sudah sepi. Mau bagaimana, kita bertahan saja untuk bisa makan” (Ibu S wawancara, Selasa 16 Februari 2016. Pkl 09.00 WIT).

Salah satu faktor penghambat kesejahteraan umum adalah semangat dan kerja keras dalam sebuah usaha. Jika seseorang atau kelompok ingin mencapai kesuksesan, maka diperlukan semangat dan kerja keras dalam usaha. Dalam penerapan prinsip kesejahteraan umum bagi para pedagang pasar Wamanggu belum terlihat kesuksesannya, sebab para pedagang kurang memiliki semangat dan kerja keras dalam usaha berdagang. Ada sebagian

pedagang yang mau berdagang bila mereka memiliki modal dan barang, yang harus disadari untuk proses kesana sangat sulit, jika tidak dibekali dengan semangat dan nilai juang yang tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terkait implementasi atau penerapan tiga prinsip umum Ajaran Sosial Gereja bagi para pedagang pasar Wamunggu Kabupaten Merauke, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Yang pertama penerapan prinsip solidaritas di pasar Wamunggu sudah dijalankan oleh para pedagang, namun hanya berdasarkan pada kedekatan personal pedagang, kedekatan kekeluargaan, serta latar belakang suku dan budaya antar pedagang yang sama. Hal ini mencerminkan nilai solidaritas yang dibangun pada blok atau kelompok jenis dagang tertentu yang notabene berasal dari suku dan budaya yang sama. Nilai solidaritas juga dilihat dari segi penempatan tempat dagang yang belum teratur dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya keributan-keributan kecil antar pedagang. Hal yang sama juga pada segi pemerataan harga barang yang berbeda namun sama jenis. Semua ini menimbulkan unsur kecemburuan antar para pedagang, maka berakibat pada renggangnya hubungan, baik dari segi interaksi maupun sikap yang ditunjukkan oleh para pedagang sendiri.

Yang kedua adalah prinsip subsidiaritas yang dibangun atau diterapkan oleh para pedagang di pasar Wamunggu kabupaten Merauke masih jauh dari harapan. Belum terlihat prinsip subsidiaritas baik diterapkan antar sesama

pedagang maupun pihak terkait yang mau membantu pedagang. Prinsip subsidiaritas yang berkaitan dengan pemberian bantuan, baik berupa modal (uang) maupun pengetahuan, pengalaman, dan motivasi mesti diterapkan bagi para pedagang. Demi kebersamaan dan kemajuan dalam kelompok pedagang di pasar Wamunggu kabupaten Merauke.

Yang ketiga adalah prinsip kesejahteraan umum sudah diterapkan di pasar Wamunggu kabupaten Merauke. Prinsip ini diterapkan oleh pihak pengelola pasar yang berkaitan dengan keamanan dan kebersihan pasar demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Untuk kesejahteraan yang dibangun oleh para pedagang sendiri demi tujuan bersama pedagang, belum terlihat penerapannya. Sebagian pedagang hanya mementingkan dirinya sendiri, serta mengabaikan kesejahteraan umum, dimana kesejahteraan pribadi diutamakan dibanding kesejahteraan bersama.

Dari ketiga hal ini, maka penulis mencoba untuk bercermin dari *Ensiklik Laborem Exercens*, melihat realita akan evolusi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, serta munculnya kaum kapitalisme. Permasalahan yang diangkat dalam ensiklik ini terkait dengan kerja dan modal, tanpa disadari telah membentuk kelas-kelas masyarakat dalam dunia usaha dan masyarakat. Sebagaimana kenyataan di pasar Wamunggu Kabupaten Merauke, telah masuk dalam hal ini. Para pedagang sendiri telah menciptakan tembok pemisah antara mereka sendiri. Para pedagang mengutamakan kepentingan sendiri dan mengabaikan relasi-relasi kerja antar pedagang yang lain, semua ini telah berdampak buruk bagi mereka.

B. Rekomendasi

1. Bagi Para Pedagang Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke

Dengan penelitian ini diharapkan para pedagang di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke dapat menerapkan 3 (tiga) prinsip umum Ajaran Sosial Gereja yakni, Solidaritas, Subsidiaritas, dan Kesejahteraan Umum demi kepentingan bersama dalam komunitas pedagang di pasar Wamanggu. Selain itu para pedagang semestinya melihat kemajemukan sebagai salah satu kekayaan dalam komunitas, karena mereka saling berbagai dan mengambil bahagian di dalamnya.

2. Bagi Pemerintah

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah agar dapat membantu para pedagang di pasar Wamanggu, baik bantuan modal usaha maupun kegiatan-kegiatan sosialisasi agar menambah pengetahuan pedagang dalam hal berdagang. Mengingat akan pedagang lokal (Papua) yang belum dibekali dengan pengetahuan yang memadai serta bantuan modal usaha. Dengan jaminan akan otonomi khusus (otsus) sangatlah diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi mereka dalam menghadapi era modern ini. Sehingga para pedagang merasa diperhatikan oleh pemerintah, demi mengembangkan usaha pedagang yang lebih baik lagi.

C. Implikasi Pastoral

Dokumen Ajaran Sosial Gereja merupakan pedoman dan kekayaan Gereja dalam menanggapi permasalahan masyarakat dan dunia baik dari segi budaya, pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan permasalahan lainnya yang dialami oleh masyarakat secara umum. Ajaran Sosial Gereja bukan hanya milik Gereja atau umat Kristiani semata, namun milik semua orang yang mau menggunakannya. Kehadiran dokumen Ajaran Sosial Gereja sebagai sebuah kontribusi yang diberikan Gereja dalam membantu dunia dan masyarakat. Ini merupakan jenis suara Kenabian zaman sekarang, dimana Gereja prihatin akan kehidupan masyarakat dan dunia yang telah jauh dari nilai-nilai luhur hidup manusia.

Sama halnya dengan ungkapan Sri Paus dalam ensiklik LE, akan pengaruh Gereja yang sangat besar bagi evolusi masyarakat. Dengan kata lain, Gereja bukan hanya berpatokan pada teori ilmiah semata, akan tetapi kontribusi Gereja yang nyata serta langsung kepada masyarakat, itulah yang diinginkan. Gereja harus keluar dan melihat umatnya yang membutuhkan uluran tangannya. Gereja sebagai medium, dengan cara yang dimiliki baik dari segi pastoral maupun liturgis diusahakan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi pelbagai macam permasalahan sosial yang ada.

Tiga prinsip umum Ajaran Sosial Gereja yakni, solidaritas, subsidiaritas dan kesejahteraan umum merupakan 3 (tiga) prinsip yang saling mendukung dan melengkapi. Ajaran sosial Gereja menuntut relasi-relasi di dalam dunia

kerja mesti ditandai oleh kerja sama, dimana kebencian serta upaya-upaya untuk menghapus sesama tidak dapat diterima sama sekali. Nilai solidaritas yang paling tinggi dilakukan oleh Yesus dari Nazaret, “Manusia Baru, yang bersatu dengan manusia bahkan sampai mati di kayu salib” (Flp 2:8). Terdorong juga oleh perintah Injil, “kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma” (Mat 10:8). Dengan demikian Gereja mengajarkan kepada kita bahwa seseorang harus membantu sesamanya didalam berbagai kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat lewat karya-karya belas kasih Allah kepadanya.

Dari tulisan sederhana ini, merupakan salah satu kontribusi yang diberikan Gereja kepada masyarakat (pedagang Papua) yang masih jauh dari kata sejahtera. Mengingat akan relevansi penulis yang berprofesi sebagai katekis demi pelayanan akan Gereja (Kristus) kepada umat, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban penulis untuk mengkaji dan menelusuri ketimpangan-ketimpangan dan dekadensi yang terjadi di masyarakat (pedagang). Semua ini demi tercapainya keadilan bagi semua orang, sebagai salah satu bentuk dari suara kenabian zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amo, Anselmus. *Tesis “Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pertanian Sayur Mayur Oleh PT Selaras Inti Semesta di Kampung Zanegi”*. Depok, 2013.
- Curran, Charles E. *Buruh, Petani, dan Perang Nuklir*. Cet. Ke-5. Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Dokumentasi dan Penerangan KWI; *Dokumen Konsili Vatikan II* (terj.), (Jakarta : Obor), 2013. Cet. Ke- 12.
- Griffin, Bishop James A. *Ringkasan Katekismus Gereja Katolik Yang Baru*. Cet. Ke-1. Jakarta: Obor, 1996.
- Fua, Muhamad. *Pengantar Bisnis*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Kristiyanto, Eddy. *Diskursus Sosial Gereja*. Cet. Ke-3. Malang: Dioma, 2003
- KWI Regio Nusa Tenggara; *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende : Nusa Indah), 2007. Cet. Ke-III.
- Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Cet. Ke-2. Maumere: Ledalero, 2013.
- Rausch, Thomas P. *Katolisisme*. Cet. Ke-6. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. Ke-1. Jakarta: STIE 2003
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2008